

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN : PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
Program : Pentunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi yang akan dilakukan/dihadiri : 12 Kali Jumlah Laptop yang ada untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi untuk : Laki-laki : 5 Unit Perempuan : 0 Unit Perempuan : 6 Orang, Laki-laki : 5 Orang	Akasa: Terjadi kesenjangan peralatan (Laptop) yang ada untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi. Partisipasi : Dibutuhkan Laptop yang mendukung untuk melaksanakan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi, terutama bagi perempuan (Laptop yang lebih ringan) yang dapat dibawa kemana-mana (kerja diluar kantor).	1. Kesenjangan terhadap Laptop yang tersedia dengan ASN Perempuan yang akan menggunakannya yang maka Laptop yang tersedia tidak memberikan kenyamanan terutama dibawa secara keluar kantor, karena laptop yang tersedia ukurannya cukup besar dan berat. 2. ASN yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi adalah Analisis Perencana yang merupakan seorang ASN Perempuan	1. Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi sering dilakukan di Luar Kantor 2. Belum optimalnya rencana pengadaan peralatan kerja (laptop) dengan ASN yang akan menggunakannya (Laki-laki/ Perempuan)	Terselenggaranya Tugas dan Pekerjaan ASN Perempuan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang Responsif Gender	1. Menambah/ pengadaan peralatan kerja (Laptop) untuk ASN Perempuan di Bagian Perencanaan dan Keuangan khususnya untuk Perencana yang akan mengikuti dan menghadiri Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi yang memerlukan Laptop di Luar Kantor	Input : Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Output : Terpenuhinya kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di bagian Perencanaan dan Keuangan	Indikator Kinerja : Jumlah ASN Perempuan yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor yang mengharuskan membawa Laptop Outcome : Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIKOLK

JEFRIZAL, S.Pd., M.T.
NIP. 19680522 199403 1 007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKDP : SEKRETARIAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2027

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota : 4.01.01 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Output Kegiatan	: Terpenuhinya kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Analisis Situasi	: 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilihan Gender) 2. Data Jumlah ASN di Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor yang mengharuskan membawa Laptop Perempuan : 6 Orang Laki-laki : 5 Orang 3. Data Jumlah Laptop yang bisa untuk digunakan dan dibawa keluar keluar kantor oleh ASN Perempuan Laptop yang tersedia : 5 Unit Laptop yang mendukung untuk dibawa oleh ASN Perempuan acara di luar kantor : 0 Unit 4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Kesenjangan terhadap jumlah peralatan kantor (laptop) yang ada untuk mendukung aktifitas kerja di luar kantor antara ASN laki-laki dan perempuan. 2. Pengadaan Laptop belum mempertimbangkan kondisi fisik antara laki-laki dan perempuan.
4	Rencana Aksi	: 1. Sumber Daya Pendukung (Peralatan Kantor) Menambah jumlah pengadaan Laptop di Bagian Perencanaan dan keuangan khususnya untuk ASN Perempuan. 2. Alokasi Anggaran : Rekening Belanja Modal Personal Computer (Laptop) sebesar : Rp. 30.000.000,-


 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SOLOK
 JEFRIZAL, S.P., M.T.
 NIP. 19680522 199403 1 007

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Sekretariat DPRD

PROGRAM : Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Instansi/ Program/Kegiatan	Data Demografi Perempuan	ISU GENDER :	Kutangnya kesempatan bagi perempuan dalam mengambil kebijakan terkait DPRD dan Sekretariat DPRD		KEMERAKSIAN DAN HEMANA KOTIFIAN		PENGEKORAN HASIL	
		Faktor Kewajaangan	Sekolah Kesempatan Internal	Sekolah Kesempatan Eksternal	Reformasi Tujuan	Reformasi Alat	Reformasi Data (Basis-Data)	Indikator Kinerja
Program : Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan : Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Solo Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tujuan : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Asas : DPRD	Rencana Tahunan / Peraturan Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Data Umum - Jumlah Raperda yang dibahas : 3 Raperda - Data pejabat DPRD Kabupaten Solok dan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok - Data Anggota DPRD Kab. Solok: L= 28 orang, P= 4 orang - Data Pimpinan DPRD Kab. Solok: L= 3 orang, P= 1 orang - Jumlah Sekretariat yang mendampingi P= 3 orang L= 10 orang	Alasan : - Kesempatan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang diperoleh karena budaya patriarki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. - Masih minimnya keterwakilan perempuan dalam tim pemerintah kabupaten atau - Partisipasi : - Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih minim - Masih minimnya keterwakilan perempuan dalam tim pemerintah kabupaten atau - Partisipasi : - Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih minim Kontrol : - Perlu adanya aturan Undang-undang yang dapat membatasi kesempatan/peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang - Perlu meningkatkan pemahaman kaum perempuan dalam pemerintahan Manfaat : - Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang proporsional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang	- Karangnya pemerintahan pengambil kebijakan terkait ini gender - SDM Aparatur yang belum merata secara gender - Belum terosialisasikan isu kesetaraan gender yang memadai - Kurangnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses pembahasan raperda	- Adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak tahan banting - Budaya patriarki yang masih hidup di masyarakat yang menempatkan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi	- Memberi kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam pembahasan Raperda (Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD)	- Meningkatkan sarana pembahasan yang nyaman - Kecepatan Tim - Pendampingan yang tepat	- Jumlah Raperda yang dibahas (3 tahun terakhir) sebanyak 18 Raperda	- Jumlah Raperda Tahunan yang dibahas 3 Raperda - Keterwakilan perempuan dalam seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tanpa membedakan Gender Input: Np 1,301,241,042 Output: Jumlah Raperda yang dibahas menjadi Poda sebanyak 3 Dokumen Outcome : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



**GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

PROGRAM	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
KODE REKUNING	4.02.02.2.01.0002
Analisis Situasi	- Data Pembuka Wawasan - Jumlah Ranperda yang dibahas sebanyak 3 Ranperda. - Jumlah Anggota DPRD yang membahas, Perempuan 4 orang dan laki-laki 28 orang. - Data Pimpinan DPRD Kab. Solok, Laki-laki 1 orang dan Perempuan = - - Jumlah Sekretariat yang mendampingi, perempuan sebanyak 5 orang dan laki-laki 10 orang. - Isu dan Faktor Kesenjangan Gender - Akses - Kesempatan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang dipersulit karena budaya patriarki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan - Masih minimnya keterwakilan perempuan dalam tim perumus atau narasumber ahli. - Partisipasi - Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih susah karena kesempatan bagi perempuan masih terbatas oleh sebab budaya patriarki. - Perempuan kurang berpartisipasi dalam memberikan masukan - Kontrol - Perlu adanya aturan/tindakan yang dapat memberi kesempatan/Peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang. - Perlu meningkatkan antisipasi kaum perempuan dalam pembentukan Perda - Mandiri - Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang proporsional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang. - Penyebab Kesenjangan Internal - Masih Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terkait isu gender - Masih kurangnya SDM Aparatur yang merata secara gender - Masih kurangnya sosialisasi tentang perencanaan yang responsif gender - Masih kurangnya kurangnya partisipasi dan keterwakilan perspektif perempuan dalam proses pembahasan ranperda - Penyebab Kesenjangan Eksternal - Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak ujan banting. - Budaya Patriarki yang masih hidup di masyarakat yang menetapkan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi.
Capaian Program	- Tolok Ukur : Terlaksananya pembahasan yang tepat waktu - Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan	Rp. 1.901.241.042
Rencana Aksi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 3 Dokumen Hasil : Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 3 Perda
	

MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIYAKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIYAKAN DAN BENCANA KEDEPAN		PENGUJIAN HASIL	
		FAKTOR KESERUJANGAN	SEBAB KESERUJANGAN INTERNAL	SEBAB KESERUJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA	INDIKATOR KINERJA
Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Review PPRG, Monev PPRG, Bimtek PPRG, Sharing Informasi PPRG Tujuan: 1. Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau tidak 2. Mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan 3. Mengidentifikasi hal-hal penting yang berdampak atau pengembangan kebijakan dinas yang akan datang	1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 2. Permen PIA No 10 Tahun 2004 terkait dengan pengawasan dan evaluasi PPRG menyatakan bahwa Inspektorat berperan melakukan pengawasan PPRG 3. Pemerintah belum menyertuh terhadap substansi pelaksanaan PPRG pada masing-masing sub kegiatan yang tercantum di GAP dan GBS 4. Sasaran pengawasan PPRG adalah OPD dan Kecamatan di Kabupaten Solok	Akses: APIP berperan melakukan Review dan Monev PPRG guna menilai kelengkapan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh OPD telah responsif gender Partisipasi: Masing-masing OPD berkewajiban menyusun PPRG, review dan monev per triwulan yang dilakukan terhadap OPD sampel Kontrol: Perlu melaksanakan review dan monev PPRG yang lebih berkualitas Mamfaat: Diperlukan rekomendasi pelaksanaan PPRG sesuai standar yang diharapkan pada masing-masing OPD	1. APIP belum secara nyata mendapatkan pelatihan / bimbingan teknis terkait pelaksanaan Review PPRG 2. Keterbatasan personal, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan review dan Monev	1. Masih kurangnya pemahaman serta rendahnya komitmen OPD dalam pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran 2. Penyusunan GAP dan GBS belum dianggap sebagai kebutuhan tapi masih sebatas pemenuhan laporan 3. Persepsi bahwa PPRG hanya menjadi kepentingan OPD yang mengalami urusan gender	1. Terjadinya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada masing-masing OPD di Kabupaten Solok 2. Terjadinya peningkatan pemahaman dan kompetensi APIP secara merata dalam melaksanakan review dan monev PPRG	1. Pelaksanaan Review dan Monev PPRG terhadap OPD Sampel 2. Mengikuti bimtek, komputer / sharing informasi tentang PPRG	Ketersediaan personal dan anggaran di Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan review, Monev PPRG dan peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan review PPRG	Output: Berlaksananya review dan monev PPRG terhadap OPD Sampel serta mengikuti bimtek dan sharing informasi Outcome : Meningkatnya kualitas pelaporan review PPRG serta peningkatan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan review PPRG

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
BAGAS KEBUJUKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUJUKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGLIBURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAR KESENJANGAN INTERNAL	SEBAR KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA	INDIKATOR KINERJA
Program 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Kerja Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tujuan 1. Tercapainya pemenuhan peningkatan kapasitas bagi APSP lingkup Inspektorat Kab Solok secara lebih merata dan akomodatif terhadap kepentingan perempuan 2. Memberikan kesempatan yang sama bagi APSP untuk mengikuti peningkatan kapasitas serta mengakomodasi kesulitan APSP perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan diluar kota / propinsi	1. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang dan berifat dinamis, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi APIP Inspektorat daerah secara berkala Sebagai APIP berkepentingan 2. mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas APIP	Akses: Masing-masing APIP memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas Partisipasi: APIP perempuan biasanya kesulitan dalam mengikuti lingkungan teknis / diklat meninggalkan rumah selama berhari-hari dengan pertimbangan keluarga Kontrol: Perlu ditetapkan suatu mekanisme agar terjadi pemerataan kesempatan dan kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas Mandati: Terjadinya pemerataan kesempatan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapabilitas APSP	Perempuan sebagaimana kodratnya sebagai ibu sangat berperan dan berfungsi dalam rumah tangga pelaksanaan diklat/bimtek diluar kantor selama berhari-hari meninggalkan keluarga akan mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga	Pelaksanaan Diklat/Bimtek umumnya dilaksanakan diluar kota sehingga mengharuskan peserta meninggalkan rumah untuk beberapa waktu	Perlu melaksanakan suatu mekanisme peningkatan kapasitas APSP dengan memperluas kesempatan bagi peserta serta kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti Diklat / Bimtek dengan tidak terlalu mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga	Mengagendakan secara berkala pelaksanaan Pelatihan kantor mandiri berlokasi diluar kantor sendiri dengan memperluas kesempatan secara merata	Ketersediaan anggaran dan kegiatan pendukung untuk pelaksanaan pelatihan mandiri di kantor sendiri	Terlaksananya pelatihan mandiri di kantor sendiri secara berkala

Arosuka, 6 Mei 2028
INSPEKTUR DAERAH


DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19840414 201101 1 010

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
KODE PROGRAM	6.01.02
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
SUB KEGIATAN	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
OUTPUT KEGIATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan
ANALISIS SITUASI	a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan b. Permen P3A No. 10 Tahun 2004 terkait dengan pengawasan dan evaluasi PPRG menyatakan bahwa inspektorat berperan melakukan pengawasan PPRG c. Pemeriksaan belum menyentuh terhadap substansi pelaksanaan PPRG pada masing-masing sub kegiatan yang tercantum di GAP dan GRS d. Sasaran pengawasan PPRG adalah OPD dan Kecamatan se Kabupaten Solok
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan gender PPRG belum dilaksanakan secara baik sesuai standar yang diharapkan oleh masing-masing OPD. a. Faktor Kesenjangan Akses APIP berperan melakukan Review dan Monev PPRG guna memberi keyakinan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh OPD telah responsif gender Partisipasi Masing-masing OPD berkewajiban menyusun PPRG, review, dan monev per triwulan yang dilakukan terhadap OPD sampel Kontrol Perlu melaksanakan review dan monev PPRG yang lebih berkualitas dengan peningkatan kapabilitas APIP Manfaat Didapatkan rekomendasi pelaksanaan PPRG sesuai standar yang diharapkan pada masing-masing OPD b. Sebab Kesenjangan Internal 1. APIP belum secara merata mendapatkan pelatihan / Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan Review PPRG 2. Keterbatasan personil, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan review dan Monev c. Sebab Kesenjangan Eksterna 1. Masih kurangnya pemahaman serta rendahnya komitmen OPD dalam pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran 2. Penyusunan GAP dan GRS belum dianggap sebagai kebutuhan tapi masih sebatas pemenuhan laporan 3. Persepsi bahwa PPRG hanya menjadi kepentingan OPD yang menangani urusan gender
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur 1. Terlaksananya Review, Monev PPRG, Bimtek PPRG, Sharing Informasi PPRG Indikator dan target Kinerja 1. Terlaksananya review PPRG bagi OPD sampel 2. Terlaksananya Monev PPRG Pertriwulan 3. Terlaksananya kegiatan Bimtek PPRG 4. Terlaksananya sharing Informasi terkait PPRG
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 18.680.000,- (Enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
RENCANA AKSI	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Masukan : Dana, Rp. 18.680.000,- Keluaran : 1. Review PPRG (20 OHP @ 150.000 = Rp. 3.000.000) 2. Monev PPRG (4 x 20 OHP @ 150.000 = Rp. 12.000.000,-) 3. Bimtek PPRG (2 OHP @ 150.000 = 300.000) 4. Konsultasi / Sharing informasi (4 OH @ 340.000) = Rp. 1.360.000 Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Arosuka, 6 Mei 2020
INSPEKTUR DAERAH


DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (N.6)
NIP. 19840414 201301 1 010

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027**

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE PROGRAM	X.XX.01
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
OUTPUT KEGIATAN	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan:
ANALISIS SITUASI	a. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang dan bersifat dinamis, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi APIP Inspektorat daerah secara berkala. b. Setiap APIP berkepentingan mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas APIP.
ANALISIS SITUASI	2. Ibu dan Faktor Kesenjangan gender APIP perempuan merasa kesulitan mengikuti diklat/bimtek jika dilaksanakan diluar kota yang mengharuskan mereka meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu. a. Faktor Kesenjangan Akses: Masing-masing APIP memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas. Partisipasi: APIP perempuan biasanya kesulitan dalam mengikuti bimbingan teknis / diklat meninggalkan rumah selama berhari-hari dengan pertimbangan keluarga. Kontrol: Perlu ditetapkan suatu mekanisme agar terjadi pemerataan kesempatan dan kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas. Manfaat: Terjadinya pemerataan kesempatan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapabilitas APIP. b. Sebab Kesenjangan Internal Perempuan sebagaimana kodratnya sebagai ibu, sangat berperan dan berfungsi dalam sebuah rumah tangga, pelaksanaan diklat/bimtek diluar kantor selama berhari-hari meninggalkan keluarga akan mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. c. Sebab Kesenjangan Eksterna Pelaksanaan Diklat/Bimtek umumnya dilaksanakan diluar kota sehingga mengharuskan peserta meninggalkan rumah untuk beberapa waktu.
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur: Tersedianya makan minum untuk penyelenggaraan Pelatihan Kantor Mandiri Indikator dan target Kinerja: Terlaksananya Pelatihan Kantor Mandiri
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
RENCANA AKSI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Mesukan : Dana, Rp. 7.500.000,- Keluaran : Makan minum bagi 10 kali Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri @ 750.000 Hasil : Peningkatan Kapabilitas APIP

Arceuka, 6 Mei 2025
INSPEKTUR DAERAH

DERY AKMAL, ST.
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19840414 201101 1 010

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: Bapelitbang Kabupaten Solok
TAHUN ANGGARAN	: 2027
PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	5.01.01
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan ✓ Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. ✓ Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok. ✓ Jumlah undangan sebanyak 250 undangan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender. ➤ Faktor Kesenjangan ✓ Akses. Karena untuk mengikuti Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2027, perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggali isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas. Lokasi Musrenbang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Solok pada pusat Pemerintahan. ✓ Partisipasi. Kurangnya minat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2027 dikarenakan mayoritas yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan adalah laki-laki. ✓ Kontrol. • Belum optimalnya pengawasan dari Perencana Bapelitbang. • Setiap Perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam pengambilan putusan. • Setiap yang diusulkan perempuan jarang yang langsung terpenuhi ✓ Manfaat. Lebih berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah karena musyawarah untuk mufakat pada Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2027 tidak hanya didominasi oleh laki-laki (80%) tetapi juga dari perempuan (20%) yang diketahui

	mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal kecil dan hal-hal yang bersifat detail (80%) jika dibandingkan dengan laki-laki sekitar (20%). ✓ Penyebab Internal. • Kesenjangan internal peserta Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2027 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang masih kurang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya komitmen dan manfaat yang dirasakan oleh peserta perempuan dibandingkan laki-laki. Faktor budaya juga berperan, seperti belum adanya kepercayaan bahwa perempuan memiliki pengetahuan tentang proses perencanaan dan pembuatan RKPD. Selain itu, kurangnya informasi tentang Musrenbang, minat masyarakat untuk menghadiri, dan kesibukan calon peserta juga dapat menjadi penyebab. ✓ Penyebab Eksternal • Kesenjangan eksternal dalam partisipasi Musrenbang RKPD, yang berarti partisipasi masyarakat yang masih kurang, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi dan informasi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya kepedulian, serta kurangnya akses informasi dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan).		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang RKPD Kab. Solok		
	2. Indikator dan Target Kinerja a. Terlaksananya Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2027. <u>Input:</u> Rp. 41.117.677,- <u>Output:</u> Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten <u>Outcome:</u> Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD		
RENCANA AKSI	KOMPONEN 1	- Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten	
		Tujuan	Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang RKPD
		Alokasi Anggaran	Rp. 41.117.677,-

Masa, 04 Mei 2026


KEPALA BAPELITBANG
NAFRI, ST.MT.M.Sc
 Nip. 197905172005011008

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok (BAPELITBANG)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Tujuan : Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Tahun 2027.	- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional - Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Nagari di Kabupaten Solok Jumlah Peserta Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah 250	Akses : Karena untuk mengikuti Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD Tahun 2027), perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggali isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas. Lokasi Musrenbang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Solok pada pusat Pemerintahan. Partisipasi : Kurangnya minat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD Tahun 2027) dikarenakan	Kesenjangan internal peserta Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang masih kurang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya komitmen dan manfaat yang dirasakan oleh peserta perempuan dibandingkan laki-laki. Faktor budaya juga berperan, seperti belum adanya kepercayaan bahwa perempuan memiliki pengetahuan tentang proses	Kesenjangan eksternal dalam partisipasi Musrenbang RKPD, yang berarti partisipasi masyarakat yang masih kurang, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi dan informasi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya kepedulian, serta kurangnya akses informasi dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat (laki-laki,	Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD Kabupaten Solok.	- Terlaksananya Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD 2027) dengan baik dan tepat sasaran. - Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Verifikasi data melalui Forum SKPD	Jumlah Peserta Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah 250 Undangan terdiri dari: - Bupati Solok 1 Orang - Sekda Provinsi 1 Orang - Pimpinan DPRD 3 Orang - Sekretaris Daerah 1 Orang - Staf Ahli Bupati 3 Orang - Asisten dilingkup Sekda 3 Orang - Ketua TP PKK 1 Orang - Ketua GOW 1 Orang - Ketua Dharmawanita 1 Orang - Kepala Perangkat Daerah 27 Orang	Indikator Kinerja Terlaksananya Musrenbang Tahun 2026 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2027 Input Rp. 41.117.577.- Output: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten. Outcome; Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai dengan target.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Undangan terdiri dari: - Bupati Solok 1 Orang - Sekda Provinsi 1 Orang - Pimpinan DPRD 3 Orang - Sekretaris Daerah 1 Orang - Staf Ahli Bupati 3 Orang - Asisten dilingkup Sekda 3 Orang - Ketua TP PKK 1 Orang - Ketua GOW 1 Orang - Ketua Dharmawanita 1 Orang - Kepala Perangkat Daerah 27 Orang - Camat se Kab.Solok 14 Orang - Kepala Bagian 12 Orang - Kepala BPS 1 Orang - Kepala BPJS Kesehatan 1 Orang	mayoritas yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan adalah laki-laki. Kontrol : - Belum optimalnya pengawasan dari Perencana pada Bapelitbang Kabuoaten Solok - Setiap Perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam pengambilan putusan. - Setiap yang diusulkan perempuan jarang yang langsung terpenuhi. Manfaat : Lebih berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah karena musyawarah untuk mufakat pada Musrenbang Tahun	perencanaan dan pembuatan RKPd. Selain itu, kurangnya informasi tentang Musrenbang, minat masyarakat untuk menghadiri, dan kesibukan calon peserta juga dapat menjadi penyebab.	perempuan, dan kelompok rentan.			- Camat se Kab.Solok 14 Orang - Kepala Bagian 12 Orang - Kepala BPS 1 Orang - Kepala BPJS Kesehatan 1 Orang - Kepala Baperida Kota Solok 1 Orang - Rektor STAI Solok 1 Orang - Tokoh Masyarakat 5 Orang - LKAAM 1 Orang - Bundo Kandung 1 Orang - Ketua Forum Anak 1 Orang - Ketua Forum Disabilitas 1 Orang - Ketua PGRI 1 Orang - Ketua IDI 1 Orang - Petani Melenial 1 Orang - Pelaku UMKM 3 Orang - Pelaku Wisata 3 Orang	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Kepala Baperda Kota Solok 1 Orang - Rektor STAI Solok 1 Orang - Tokoh Masyarakat 5 Orang - LKAAM 1 Orang - Bundo Kanduang 1 Orang - Ketua Forum Anak 1 Orang - Ketua Forum Disabilitas 1 Orang - Ketua PGRI 1 Orang - Ketua IDI 1 Orang - Petani Melenial 1 Orang - Pelaku UMKM 3 Orang - Pelaku Wisata 3 Orang - Wali Nagari 74 Orang - Insan Pers 5 Orang - Tim Bapelitbang 54 Orang	2026 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2027 tidak hanya didominasi oleh laki-laki (80%) tetapi juga dari perempuan (20%) yang diketahui mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal kecil dan hal-hal yang bersifat detail (80%) jika dibandingkan dengan laki-laki sekitar (20%).					- Wali Nagari 74 Orang - Insan Pers 5 Orang - Tim Bapelitbang 54 Orang Peserta Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD Tahun 2027) terdiri dari 250 orang yang hadir antaranya orang laki-laki dan orang perempuan.	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Peserta Musrenbang Tahun 2026 (Penyusunan RKPD Tahun 2027) terdiri dari 250 orang yang hadir antaranya orang laki-laki dan orang perempuan. - Juknis Pelaksanaan Musrenbang. - Diketahui partisipasi perempuan sangat rendah dalam mengikuti Musrenbang, dapat dilihat dari perbandingan Absensi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut: - Tahun 2023 Peserta Musrenbang							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	RKPD 250 Orang (197 Laki-laki dan 96 orang perempuan) - Tahun 2024 peserta Musrenbang RKPD 250 orang (207 Laki-laki 43 Perempuan) - Tahun 2025 Peserta Musrenbang RKPD 250 Orang (197 Laki-laki dan 96 orang perempuan) - Penyebab rendahnya minat perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dikarenakan kesibukan ibu rumah tangga yang dikerjakan.							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

04 Mei 2026



8 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.	1. Keputusan Bupati Solok Nomor 910- 051-2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 910- 033-2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2. Jumlah Tim TAPD Sebanyak 35 orang terdiri dari 11 orang perempuan dan 24 orang laki-laki.	Akses : Keterbatasan anggota perempuan untuk fokus dalam pembahasan. Peran : Dominasi anggota Laki-laki dalam diskusi informal di luar jam rapat resmi (saat malam hari) yang membuat anggota tertinggal informasi. Kontrol : Pengambilan keputusan krusial sering terjadi pada jam-jam larut malam. Dimana konsentrasi dan kehadiran peserta perempuan menurun karena faktor keamanan dan kenyamanan.	1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020: Mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk tahapan penyusunan dan kesepakatan KUA- PPAS antara eksekutif (TAPD) dan legislatif (Banggar DPRD). 2. Belum adanya SOP rapat luar kantor yang mengatur standar Fasilitas Responsif Gender. 3. Budaya politik yang menganggap pembahasan anggaran sampai subuh adalah bentuk dedikasi, tanpa mempertimbangkan beban ganda perempuan.	1. Norma sosial yang membuat peserta perempuan merasa tidak nyaman atau bersalah jika menginap beberapa hari meninggalkan tanggungjawab pengasuhan di rumah.	Rapat yang inklusif memastikan efisiensi waktu yang berorientasi pada kualitas hasil bukan sekedar durasi waktu.	1. Melaksanakan rapat pembahasan APBD. 2. Menyusun jadwal rapat yang ketat maksimal sampai dengan jam 22.00 untuk menjaga keamanan dan kebugaran peserta. 3. Memberikan izin bagi anggota yang memiliki kondisi khusus (hamil/menyu- sui) untuk tidak menginap namun tetap hadir pada jam kerja inti.	1. Jumlah Tim TAPD Sebanyak 35 orang terdiri dari 11 orang perempuan dan 24 orang laki-laki.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Indikator: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun. Input : Pembahasan APBD yang responsive gender : Rp. 148.050.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah). Output: Terlaksananya rapat pembahasan APBD dan tingkat kepuasan peserta terhadap keamanan dan kenyamanan selama acara pembahasan.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


SYAFNUR, S.E.MM.
NIP. 197111092005011005

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN : 2027

Program	Pengelolaan Keuangan Daerah.	
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	
Sub Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. Rp. 148.050.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun.	
Output Kegiatan	Terlaksananya rapat pembahasan APBD dan tingkat kepuasan peserta terhadap keamanan dan kenyamanan selama acara pembahasan.	
Analisis Situasi	Kurangnya tingkat kepuasan peserta terhadap keamanan dan kenyamanan selama acara pembahasan. <u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u> Akses : Keterbatasan anggota perempuan untuk fokus dalam pembahasan. Peran : Dominasi anggota Laki-laki dalam diskusi informal diluar jam rapat resmi(saat malam hari) yang membuat anggota tertinggal informasi. Kontrol : Pengambilan keputusan krusial sering terjadi pada jam-jam larut malam , Dimana konsentrasi dan kehadiran peserta perempuan menurun karena faktor keamanan dan kenyamanan. Manfaat : Menghindari pengambilan keputusan penting di jam-jam rawan (tengah malam) saat tingkat konsentrasi menurun, pembahasan yang dilakukan diwaktu yang disepakati secara adil memastikan setiap pasal dalam APBD telah ditelaah secara kritis oleh seluruh anggota tim. <u>Penyebab Internal :</u> 1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020: Mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk tahapan penyusunan dan kesepakatan KUA-PPAS antara eksekutif (TAPD) dan legislatif (Banggar DPRD). 2. Belum adanya SOP rapat luar kantor yang mengatur standar Fasilitas Responsif Gender. 3. Budaya politik yang menganggap pembahasan anggaran sampai subuh adalah bentuk dedikasi, tanpa mempertimbangkan beban ganda perempuan. <u>Penyebab Eksternal :</u> Norma sosial yang membuat peserta perempuan merasa tidak nyaman atau bersalah jika menginap beberapa hari meninggalkan tanggungjawab pengasuhan di rumah.	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Melaksanakan rapat pembahasan APBD. 2. Menyusun jadwal rapat yang ketat maksimal sampai dengan jam 22.00 untuk menjaga keamanan dan kebugaran peserta. 3. Memberikan izin baik anggota yang memiliki kondisi khusus (hamil/menyusui) untuk tidak menginap namun tetap hadir pada jam kerja inti.

Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 148.050.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
Dampak/Hasil Output Kegiatan	1. Terlaksananya rapat pembahasan APBD dan tingkat kepuasan peserta terhadap keamanan dan kenyamanan selama acara pembahasan.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


SYAFNUR, SE.MM.
NIP. 197111092005011005



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Email: bkpsdm@solokkab.go.id Website: <http://bkpsdm.solokkab.go.id/>

Arosuka, 25 Mei 2026

Yth Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Penduduk dan
Perlindungan Anak Kabupaten Solok
di-
Kotobaru

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/119/BKPSDM-2026

No	Naskah dinas /Barang yang dikirim	Banyak nya	Keterangan
1	Laporan Gender Analysis Pathway (GAP) dan General Budget Statement (GBS) Tahun 2027	1 Dokumen	Demikian kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terima kasih

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



JUFRISAL, SH.MM
NIP. 19751008.200901.1.006

KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK:

- ❖ Masyarakat Bangga pada Usaha dan Daerahnya, Bertakwa, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- ❖ Perantau Bangga pada Kampung Halamannya
- ❖ Aparatur Bangga dalam Pengabdianya

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN : 2027

Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Program	5.04.02
Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Output Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA)
Analisis Situasi	1. <u>Data Pembuka Wawasan</u> - Sesuai amanat pada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator (eselon III) adalah memiliki kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. - Peraturan LAN No.16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). - Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 140 orang terdiri dari 55 orang perempuan dan 85 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) sebanyak 23 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA) adalah sebanyak 117 orang yaitu 70 orang laki-laki dan 47 orang perempuan. 2. <u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u> Isu : Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA) a. Faktor Kesenjangan Akses : Kurangnya sarana dan prasarana tempat penitipan bayi/ anak bagi peserta Diklat PIM III(PKA) perempuan. Partisipasi : - Pejabat struktural eselon III didominasi oleh 85 orang laki-laki (60,71 %) dibandingkan perempuan berjumlah 55 orang (39,29%). - Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 23 orang (16,43 %) terdiri dari 15 orang laki-laki (65,22 %) dan 8 orang perempuan (34,78 %) - Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 117 orang (83,57 %) terdiri dari 70 orang laki-laki (-59,83 %) dan 47 orang perempuan (40,17 %)

	- Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA). Kontrol : Masih kurangnya pengawasan oleh pengambil keputusan/ kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat. Manfaat: Tidak terdapat kesenjangan manfaat antara peserta Diklat PIM III (PKA) yang laki-laki maupun yang perempuan b. Penyebab Internal - Masih kurangnya kualitas SDM pejabat eselon III khususnya yang perempuan. - Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang perempuan. - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor). - Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM Tk. III (PKA) dari penyelenggara. - Terbatasnya Anggaran untuk melaksanakan diklat bagi seluruh pejabat yang belum pernah mengikuti diklat c. Penyebab Eksternal - Kurangnya sarana prasarana (tempat penitipan bayi, ibu menyusui, tempat bermain anak) di tempat terselenggaranya Diklat. Karena Pola Diklat adalah pengiriman Peserta (Pola Kontribusi) - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pejabat eselon III perempuan untuk mengikuti diklat. - Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk diklat PIM (PKA).	
Rencana Aksi	Komponen / Aktivitas	- Melaksanakan Diklat PIM Tk. III (PKA) untuk pejabat eselon III melalui pola kontribusi. - Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan. - Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan - Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor) - Mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana dengan PSDM regional bukittinggi di Baso dan BPSDM Provinsi Sumatera Barat - Jika Anggaran Sudah Memungkinkan menambah plafon Anggaran untuk pelaksanaan PIM III

	Total Anggaran	Rp.535.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
Capaian Program (di level kegiatan)	Output : Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA) Outcome : Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



JUFRISAL, SH.MM
NIP. 19751008.200901.1.006

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender :	Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)		Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan: Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	- Sesuai amanat pada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator (eselon III) adalah memiliki kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pengalaman struktural atau manajerial dan pengalaman kepemimpinan - Peraturan LAN No 16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAN No 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Akses: Kurangnya sarana dan prasarana tempat penitipan bayi/ anak bagi peserta Diklat PIM III (PKA) perempuan. Partisipasi: - Pejabat struktural eselon III didominasi oleh 85 orang laki-laki (60,71 %) dibandingkan perempuan berjumlah 55 orang (39,29%) - Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 23 orang (16,43 %) terdiri dari 15 orang laki-laki (65,22 %) dan 8 orang perempuan (34,78 %) - Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 117 orang (83,57 %) terdiri dari 70 orang laki-laki (59,83 %) dan 47 orang perempuan (40,17 %)	- Masih kurangnya kualitas SDM pejabat eselon III khususnya yang perempuan - Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang perempuan - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor) - Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM Tk. III (PKA) dari penyelenggara - Terbatasnya Anggaran untuk melaksanakan diklat bagi seluruh pejabat yang belum pernah mengikuti diklat	- Kurangnya sarana prasarana (tempat penitipan bayi, ibu menyusui, tempat bermain anak) di tempat terselenggaranya Diklat - karena Pola Diklat adalah pengiriman Peserta (Pola Kontribusi) - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pejabat eselon III perempuan untuk mengikuti diklat - Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk diklat PIM (PKA)	- Mengembangkan Kompetensi seluruh ASN (seluruh pejabat struktural eselon III baik laki-laki maupun perempuan) dalam rangka memenuhi Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok	- Melaksanakan Diklat PIM Tk. III (PKA) untuk pejabat eselon III melalui pola kontribusi. - Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan. - Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan. - Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor).	jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 140 dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 23 orang. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III adalah sebanyak 117 orang	1. Terlaksananya Diklat PIM III (PKA) untuk pejabat eselon III melalui pola kontribusi * Target: 15 orang 2. Melakukan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan 3. Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan Input: Rp.533.000.000,-

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
Tujuan: Mengembangkan Kompetensi ASN (pejabat struktural eselon III) dalam rangka memenuhi Kompetensi Manajerial (jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok)	Berdasarkan Data Per 31 Desember 2025: Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 140 orang terdiri dari 55 orang perempuan dan 85 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) sebanyak 23 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA) adalah sebanyak 117 orang yaitu 70 orang laki-laki dan 47 orang perempuan.	Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA) Kontrol: Masih kurangnya pengawasan oleh pengambil keputusan/ kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat Manfaat: -				Mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana dengan PSDM regional bukittinggi di Bako dan BPJSDM Provinsi Sumatera Barat Jika Anggaran Sudah Memungkinkan menambah plafon Anggaran untuk pelaksanaan PIM III		Output: Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA) Outcome: Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JUFRISAL, SH.MM
NIP. 19751008.200901.1.006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Masih tingginya angka kematian Ibu			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
Program: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Ibu	RPJMN 2025-2029 - Target Angka Kematian Ibu 54/100.000 Kelahiran Hidup Sesuai Peraturan Permenkes Nomor 06 Tahun 2024, tentang Standar Teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Antara lain: - Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 100% - Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 100% Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan	Akses Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum memadai berdasarkan keadaan geografis Kabupaten Solok Partisipasi Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu (skrining kesehatan sesuai standar,	- Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil - Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (13 jenis tenaga kesehatan) - Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) - Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar - Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang	- Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan) - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) dan persalinan dengan dukun	Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 94.34/100.000 KH menjadi 54/100.000 KH	- Melakukan Analisa terhadap anjalisa jabatan dan Analisa beban kerja serta peta jabatan terhadap tenaga kesehatan - Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemenuhan SDMK sesuai standar di fasilitas kesehatan - Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dan mengalokasikan pengadaan	- AKI 148/100.000 KH tahun 2021, 78.85/100.000 KH tahun 2022, 146.32/100.000 tahun 2023 dan 90.55/100.000 KH tahun 2024 dan 94.34/100.000 KH tahun 2025 - Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84.41% tahun 2021, 97.04% tahun 2022, 100% tahun 2023, 89.46% tahun 2024 dan 95.86% - Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81.9% tahun 2021, 92.61% tahun 2022, 99.76% tahun 2023, 93.28% tahun 2024 dan	- Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input : Rp. 500.000.000,- Output : Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu - Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input : Rp. 132.614.187 Output : Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Input : Rp.653.253.220,- Output : Jumlah SDM Kesehatan yang

Pusat Kesehatan Masyarakat - Aspek waktu tempuh (60 menit dari desa/kelurahan terjauh ke puskesmas kawasan tidak terpencil dan 120 menit dari desa/kelurahan terjauh ke puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil) - Standar sumber daya manusia kesehatan 19 tenaga wajib (tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan) - Ketersediaan sarana puskesmas, prasarana puskesmas dan peralatan puskesmas : 60% Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria	Kontrol Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu Manfaat Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok	Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)	- Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin tidak mampu belum memiliki Jaminan Kesehatan - Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit			baik melalui APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan - Melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu sesuai standar - Meningkatkan upaya promosi kesehatan pada masyarakat - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis dan pelatihan - Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait jaminan Kesehatan pada ibu dari keluarga kurang mampu	93.60% tahun 2025 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 57% - Dokter 1:9.437 Bidan 1:899 Perawat 1:1.766 - Puskesmas 1:20.367 Puskesmas Pembantu 1:4.661 Tempat Tidur 1:3.869 - Jumlah dukun aktif 83 orang	ditingkatkan mutu dan kompetensinya Outcome : Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan SDMK Sesuai Standar Input : Rp.800.000.000,- Output : Jumlah SDMK yang memenuhi standar di fasyankes Outcome : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input : Rp. 618.817.468 Output : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Outcome : Angka Kematian Ibu - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input : Rp. 14.968.913.971,- Output : Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Outcome : Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
---	---	--	--	--	--	---	--	--

	Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia • Dokter 1:2.500, Bidan 1:1.000, Perawat 1:855 • Puskesmas 1:16.000, Puskesmas Pembantu 1:1.500, Tempat Tidur 1:1.000							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, Mei 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok

ZULHENDRI, SKM. M. Kes
NIP. 19660604 198703 1 005



GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2026

ASPEK	URAIAN
Program	Program 1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tujuan Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kode Program	1. 1.02.02 2. 1.02.03
Kegiatan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Situasi	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin belum mencapai target antara lain : • Angka kematian ibu: 148/100.000 KH tahun 2021, 78.85/100.000 KH tahun 2022, 146.32 / 100.000 KH tahun 2023 dan 90.55/100.000 KH tahun 2024 serta 94.34/100.000 KH tahun 2025 • Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84.41% tahun 2021, 97.04% tahun 2022 dan 100% tahun 2023, 89.46% tahun 2024 dan 95.86% tahun 2025 • Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81.9% tahun 2021, 92.61% tahun 2022, 99.76% tahun 2023, 93.28% tahun 2024 dan 93.60% tahun 2025 • Dokter 1 : 9.437 Bidan 1 : 1.899 Perawat 1: 1.766 • Puskesmas 1 : 20.367 Puskesmas Pembantu 1 : 4.661 Tempat Tidur 1 : 3.869 • Jumlah dukun aktif 83 orang Isu dan Kesenjangan Gender • Faktor Kesenjangan Akses Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum memadai berdasarkan keadaan geografis Kabupaten Solok Partisipasi Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu (skrining kesehatan sesuai standar, Kontrol Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu Manfaat Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok • Penyebab Internal Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil. Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (13 jenis tenaga kesehatan)

	Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) Pelayanan kesehatan pada ibu sesuai standar Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar) • Penyebab Eksternal Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) dan persalinan dengan dukun Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin dan bayi tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit	
Capaian Program	1. Tolak Ukur : • Menurunnya Angka Kematian Ibu 2. Indikator dan target kinerja • Angka Kematian Ibu 54/100.000 Kelahiran Hidup	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp. 17.673.598.846,-	
Rencana Aksi	Komponen input 1	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input : Rp. 500.000.000,- Output : Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen input 2	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input : 132.614.187 Output : Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen Input 3	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Input : Rp.653.253.220,- Output : Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Outcome : Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan
	Komponen Input 4	Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar Input : Rp.800.000.000,- Output : Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasyankes Outcome : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
	Komponen Input 5	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input : Rp. 618.817.468,- Output : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen Input 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input : Rp. Rp. 14.968.913.971,- Output : Jumlah dokumen hasil pegelolaan jaminan kesehatan masyarakat Outcome : Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Arasuka, Mei 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok

ZULHENDRI, SKM, M. Kes
NIR. 19660604-198703 1 005

**TIM DRIVER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK**

Mengetahui:	Tanda Tangan
	1.
	2.
	1.
	2.

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2027

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN (REKONSTRUKSI JALAN)
TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan akses jalan yang aman dan nyaman pada jalan Rimbo Data - Bukit Sileh yang dapat digunakan bagi masyarakat. Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)
KEGIATAN	Peningkatan Pelaksanaan Jalan RIMBO DATA - BUKIT SILEH
KODE KEGIATAN	1.03.10.2.01.05
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Salah satu infrastruktur yang masih memerlukan peningkatan adalah ruas jalan Rimbo Data - Bukit Sileh. Berdasarkan data yang ada, panjang ruas jalan tersebut adalah 9,13 km, dengan kondisi jalan baik sepanjang 0,717 km, kondisi sedang sepanjang 3,063 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 4,650 km. Dengan demikian, sekitar 50,93% ruas jalan berada dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur jalan belum optimal sehingga manfaat pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. Data kependudukan pada wilayah yang mendekati ruas jalan tersebut, yaitu Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 5.011 jiwa, terdiri dari 2.493 jiwa penduduk laki-laki dan 2.518 jiwa penduduk perempuan. 2. Faktor Kesenjangan Gender Peningkatan ruas jalan Rimbo Data - Bukit Sileh bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sekitar 85-90%, sedangkan perempuan sekitar 10-15%, yang umumnya terlibat dalam kegiatan pendukung. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam

	forum musyawarah dan konsultasi publik terkait pembangunan jalan juga masih relatif rendah, yaitu sekitar 30%, sedangkan partisipasi laki-laki sekitar 70%. Kondisi ini menyebabkan aspirasi terkait aksesibilitas, keselamatan, dan pelayanan dasar belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan pembangunan. 3. Sebab Internal Masih terdapat keterbatasan pemahaman sebagian pengambil keputusan terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender, sehingga analisis gender dalam pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Selain itu, belum seluruh kegiatan pembangunan didukung oleh data terpilah dan analisis gender yang memadai. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, media informasi terkait pembangunan infrastruktur yang responsif gender juga masih terbatas. 4. Sebab Eksternal Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, partisipasi tokoh masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur masih relatif rendah, sehingga tingkat swadaya masyarakat juga belum optimal. Kondisi ini diperburuk oleh karakteristik wilayah Kabupaten Solok yang memiliki topografi berbukit serta berada pada kawasan yang rawan bencana seperti longsor. Hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah memiliki akses yang sulit dijangkau, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan Rimbo Data – Bukit Sileh.	
		Tujuan	Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas ruas jalan yang tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga memastikan aksesibilitas dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok pengguna jalan

		Aktifitas	Peningkatan Pembangunan jalan yang responsif gender
		Sumber daya	Dana: Rp. 9.000.000.000
		Indikator Output	Jalan yang terbangun dan termanfaatkannya= 4 Km
DAMPAK / MANFAAT (OUTCOME)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Rimbo Data - Bukit Sileh Jalan Kondisi Baik = 0,717 Km Jalan Kondisi Sedang = 3,063km Jalan Kondisi Rusak Berat = 4.650 Km Menjadi 4 Km kondisi jalan mantap yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender.		

Arosuka, Mei 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang KABUPATEN SOLOK

EFFIA VIVI FORTUNA AD,ST,MM
NIP. 19711205 199703 2 006

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6	KELOMPOK 7	KELOMPOK 8	KELOMPOK 9
KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	ISU GENDER			KELOMPOK 6		KELOMPOK 8	
		FAKTOR KEBERJANGKARAN	BERAS INTERNAL	BERAS EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program Pencelenggaraan Jalan (Rekonstruksi Jalan)	Surat Edaran 4 Menteri: No.270/M.PPN/11/2012 No. SE 33/MK.02/2012 No. 050/4379A/2012.							
Kegiatan : Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan RIMBO DATA - BUKIT SILEH	No. SE-46/MPP- PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	Akron : Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan menyebabkan belum oteranya akses mobilitas masyarakat, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi.	Belum optimalnya penerapan analisis gender dalam perencanaan serta keterbatasan data terpadu (volume lalu lintas, jenis pengguna jalan, pola mobilitas) dan pelibatan masyarakat secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan jalan	1. Faktor sosial budaya yang masih menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak utama dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal	Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas ruas jalan yang tidak hanya meningkatkan konektivitas sebagai, tetapi juga memastikan aksesibilitas dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok pengguna jalan	1. Mengintegrasikan analisis kebutuhan pengguna jalan dalam tahap perencanaan teknis untuk memastikan desain jalan sesuai dengan kondisi sosial dan mobilitas masyarakat	Ruas Jalan Berada pada Kecamatan LEMBANG JAYA. Kelamin : L: 2.493 P : 2.518 dengan total 5.011 (Data Penduduk Nagari Selayo Tawang Bukit Sileh)	Pembangunan jalan yang responsif gender Jalan RIMBO DATA - BUKIT SILEH) Input : 9 MILYAR Outcome : 4 km Terwujudnya peningkatan akses mobilitas yang lebih adil dan aman bagi seluruh masyarakat melalui infrastruktur jalan yang lebih layak dan responsif terhadap kebutuhan pengguna
Tujuan Meningkatkan ketersediaan akses jalan yang aman dan nyaman pada jalan RIMBO DATA BUKIT SILEH yang dapat digunakan bagi masyarakat Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat (laki- laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)	Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Permen PU No. 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan	Partisipasi : Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan didominasi laki-laki sekitar 85-90%, sedangkan perempuan sekitar 10-15% yang umumnya terlibat dalam pekerjaan pendukung. Dan berdasarkan perkiraan partisipasi, keterlibatan perempuan dalam forum musyawarah dan konsultasi publik terkait pembangunan jalan masih relatif rendah, yaitu sekitar 30%, sedangkan partisipasi laki-laki mencapai sekitar 70%. Kondisi ini menyebabkan aspirasi perempuan terkait aksesibilitas, keamanan, dan pelayanan dasar belum sepenuhnya terwujud		2. Rendahnya mndaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur		2. Memperkuat pengawasan lapangan agar hasil pekerjaan sesuai standar pelayanan infrastruktur yang adil dan dapat diakses semua pengguna	Panjang jalan 9,13 Km Kondisi baik = 0,717 Km Kondisi Sedang = 3,063 Km Rusak Berat = 4,650 Km	

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3	KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6	KELOMPOK 7	KELOMPOK 8	KELOMPOK 9
KELOMPOK 1	DATA PEMUKA WAWASAN	ISU GENDER			KINERJA DAN RENCANA KEDEPAAN		PERENCANAAN HASIL	
		FAKTOR KEMERDEKAAN	SEKSI INTERNAL	SEKSI EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
	Ruas Jalan Berada pada Kecamatan LUMBANG JAYA. Kelamin : L : 2.493 P : 2.518 dengan total 5.011. (Data Penduduk Nagari Salayo Tanang Bukit Sibeh)	Kontrol : Belum semua usaha masyarakat dapat diakomodir dan terlaksana karena keterbatasan anggaran dan prioritas teknis.		3. Kondisi geografis wilayah yang berbukit, bergelombang, dan sebagian masih dijangkau menyebabkan proses perencanaan, desain teknis, dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih kompleks serta membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar		3. Meningkatkan loyalitas pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan aspek keselamatan seperti drainage dan bucu jalan		
	Panjang jalan 9,13 Km Kondisi baik = 0,717 Km Kondisi Sedang = 3,063 Km Rusak Berat = 4,650 Km	Manfaat : Pemanfaatan infrastruktur jalan belum optimal karena pembangunan belum terselesaikan secara tuntas, sehingga manfaat berupa peningkatan akses dan mobilitas masyarakat belum sepenuhnya dirasakan		4. Adanya titik-titik rawan bencana pada Kab.Solok seperti longsor dan banjir di beberapa ruas jalan strategis serta permukiman penduduk menyebabkan gangguan terhadap fungsi infrastruktur jalan, sehingga pelayanan mobilitas masyarakat		4. Memperkuat pengawasan lapangan agar hasil pekerjaan sesuai standar pelaksanaan infrastruktur yang ada dan dapat diakses semua pengguna		

Arosuka, Mei 2026
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOLOK

EFFIA VIVI FORTUNA AD.ST.MM
NIP. 197305051997032006

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN	2027
PROGRAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
TUJUAN	- Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya - Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh - Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR
KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
SUB KEGIATAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
KODE KEGIATAN	1.04.03.2.03
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Solok, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian berdampak pada kualitas kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta produktivitas masyarakat. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki - laki maupun perempuan antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. Pada tahun 2026 di Kabupaten Solok, terdapat Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 8.518 unit rumah yang perlu diperbaiki. Sedangkan penerima bantuan pada tahun 2026 hanya 2 unit rumah. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan pembangunan Rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengintegrasian perspektif gender agar pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dapat memberikan manfaat yang adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat sesuai dengan - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Surat Edaran Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender.

2. Faktor Kesenjangan Gender

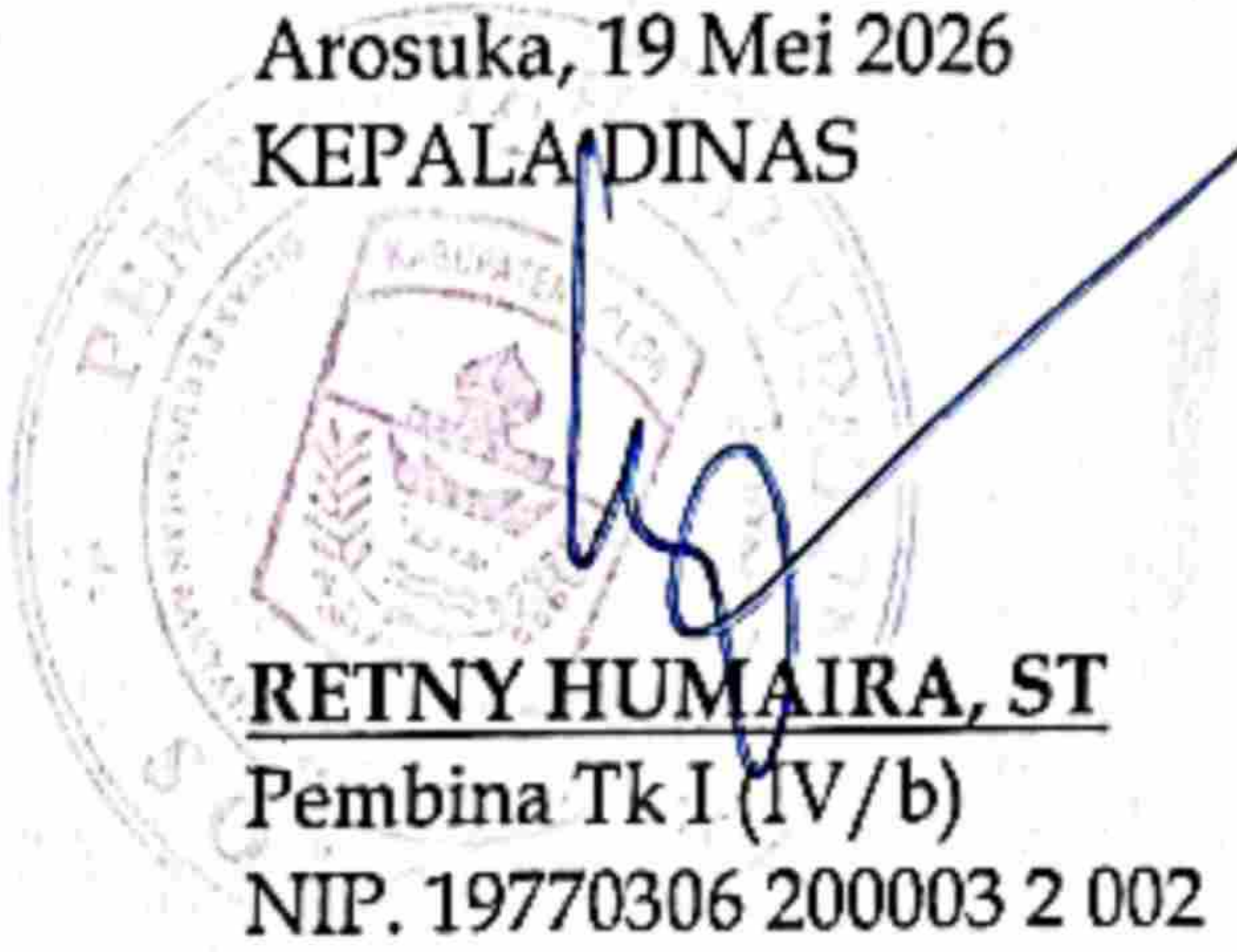
- a. **Akses :** Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan pembangunan Rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat.
- b. **Partisipasi :**
 - Dalam pembangunan perbaikan Rumah Layak Huni partisipasi laki laki lebih dominan (99%) dibandingkan perempuan (1%) karena pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi bangunan.
 - Usulan Rumah Tidak Layak Huni dapat diajukan oleh semua masyarakat baik laki - laki maupun perempuan.
- c. **Kontrol :** Kontrol pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh tim perencana, pelaksana, dan pengawas yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa membedakan gender baik laki-laki maupun perempuan.
- d. **Manfaat :**
 - Belum terbangunnya dengan baik Rumah Layak Huni secara optimal karena belum tuntasnya pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Rumah Layak Huni.

		- Penerima manfaat di subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan masyarakat yang berstatus MBR 3. Sebab Internal - Belum adanya Pembangunan Rumah Layak Huni yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat; - Belum dilaksanakannya Sosialisasi PermenPKP yang responsif gender; - Belum optimalnya pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan; - Belum Optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor; - Masih adanya SDM di OPD terkait yang belum memahami konsep gender serta belum optimalnya sosialisasi program kepada kelompok perempuan dan kelompok rentan.; - Masih terbatasnya kapasitas SDM aparatur dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 4. Sebab Eksternal Budaya masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan perumahan, sehingga rendahnya keterlibatan perempuan serta kemampuan swadaya masyarakat dalam hal perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini juga diperparah dengan letak geografis daerah Kab. Solok yang berada pada daerah rawan bencana sehingga beberapa daerah masih sulit dijangkau karena keterbatasan akses.	
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
		Tujuan	Mewujudkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang responsif gender melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

		Aktifitas	1. Melaksanakan pendataan RTLH dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok rentan, dan kondisi sosial ekonomi. 2. Meningkatkan sosialisasi program bantuan RTLH kepada masyarakat, khususnya perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan. 3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah dan proses pengambilan keputusan terkait penanganan RTLH. 4. Mengutamakan kelompok rentan sebagai prioritas penerima bantuan RTLH sesuai kriteria yang berlaku. 5. Pelaksanaan rencana perbaikan Rumah Layak Huni sesuai dengan hasil pendataan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek gender 7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program perumahan responsif gender. 8. Meningkatkan kapasitas aparatur terkait implementasi PPRG.
		Sumber daya	Dana : 235.000.000,- SDM : Narasumber /fasilitator L : 1 P : 1 Peserta L : 20 P : 20

		Indikator Output	Jumlah Peserta sosialisasi yang memahami juknis terhadap pembangunan rumah yang responsif gender laki laki = 20 Perempuan = 20 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni = 10 Unit Koordinasi yang terlaksana = 3 kali Jumlah media informasi yang disebarkan : Online = 1 buah Baliho = 1 buah
DAMPAK / MANFAAT (OUTCOME)	Membangun Rumah dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, bagi masyarakat baik laki - laki maupun perempuan yang memenuhi kriteria hunian yang layak.		

Arosuka, 19 Mei 2026
KEPALA DINAS


RETNY HUMAIRA, ST
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19770306 200003 2 002

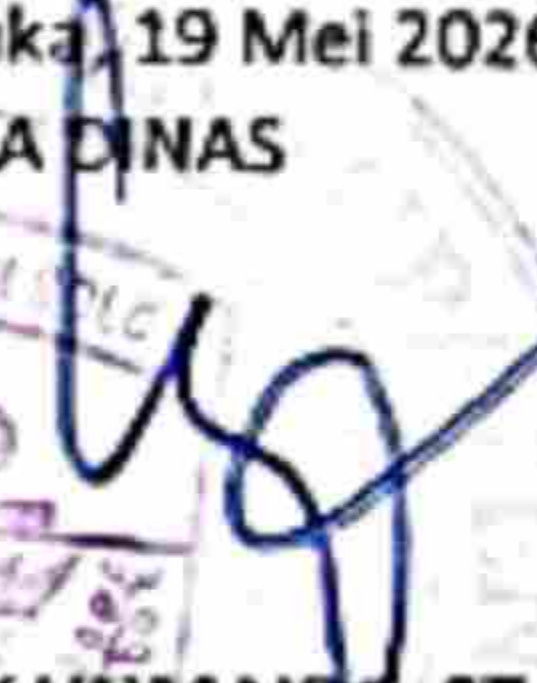
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program: Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional - No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). - Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. - Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 10 Unit Rumah	Akses : Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan pembangunan Rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat.	1. Belum adanya Pembangunan Rumah Layak Huni yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat	1. Budaya masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan perumahan.	Mewujudkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang responsif gender melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.	1. Melaksanakan pendataan RTLH dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok rentan, dan kondisi sosial ekonomi.	- Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 10 Unit Rumah	1. Pendataan penerima pembangunan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok rentan dan kondisi sosial ekonomi.
		Partisipasi : Dalam pembangunan perbaikan Rumah Layak Huni partisipasi laki laki lebih dominan (99%) dibandingkan perempuan (1%) karena pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi bangunan. - Usulan Rumah Tidak Layak Huni dapat diajukan oleh semua masyarakat baik laki - laki maupun perempuan.	2. Belum dilaksanakannya Sosialisasi PermenPKP yang responsif gender.	2. Kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan perumahan sehingga sulit dijangkau oleh tim.		2. Meningkatkan sosialisasi program bantuan RTLH kepada masyarakat, khususnya perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan.	- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki - laki maupun perempuan	2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang layak bagi masyarakat yang berstatus MBR baik laki - laki maupun perempuan
		Kontrol : Kontrol pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh tim perencana, pelaksana, dan pengawas yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan	3. Belum optimalnya pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan.	3. Penentuan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan hasil dari tim verifikasi dan kondisi kelayakan hunian, bukan berdasarkan faktor gender		3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah dan proses pengambilan keputusan terkait penanganan RTLH.	perempuan antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot.	Input : Rp. 200.000.000,- Output: Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki Outcome : 95 % Membangun Rumah dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, bagi masyarakat baik laki - laki maupun perempuan.

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Tujuan: - Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya - mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh - memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR	- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki - laki maupun perempuan antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. - Besar anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Manfaat : Belum terbangunnya dengan baik Rumah Layak Huni secara optimal karena belum tuntasnya pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Rumah Layak Huni - Penerima manfaat di sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan masyarakat yang berstatus MBR	4. Belum Optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor.	4. Keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat dalam mendukung rehabilitasi rumah.		4. Mengutamakan kelompok rentan sebagai prioritas penerima bantuan RTLH sesuai kriteria yang berlaku.		3. Sosialisasi juknis terhadap pembangunan rumah yang responsif gender bagi perencana, tim survei, fasilitator, tenaga pengawas, dan masyarakat
			5. Masih adanya SDM di OPD terkait yang belum memahami konsep gender serta belum optimalnya sosialisasi program kepada kelompok perempuan dan kelompok rentan.			5. Pelaksanaan rencana perbaikan Rumah Layak Huni sesuai dengan hasil pendataan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.		Input : 30.000.000,- Output : Terlaksananya sosialisasi responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat
			6. Masih terbatasnya kapasitas SDM aparatur dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).			6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek gender.		Outcome : 80% pemahaman terhadap sosialisasi responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)	- Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terdiri dari 10 personil (1 Kepala Bidang, 6 ASN, dan 3 Tenaga Kontrak),					7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program perumahan responsif gender.		4. Meningkatkan pembangunan informasi yang mengenai pembangunan yang responsif gender
						8. Meningkatkan kapasitas aparatur terkait implementasi PPRG.		Input : 5.000.000,- Output : Jumlah media informasi yang diadakan Outcome : Pahaminya semua kalangan masyarakat mengenai responsif gender

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBUJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA

Aro Suka, 19 Mei 2026
KEPALA DINAS

RETNY HUMAIRA, ST
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19770306 200003 2 002



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
ALAMAT	Arosuka
TAHUN ANGGARAN	2027
PROGRAM	PENDAFTARAN PENDUDUK
KODE PROGRAM	2.12.02.
KEGIATAN	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
SUB KEGIATAN	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
HASIL/OUTPUT	1. Terlaksananya Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan 2. Terlaksananya layanan Jemput Bola Terpadu dengan menggelar perekaman KTP-el dan penerbitan KIA/Akta langsung di daerah terpencil, sekolah, panti jompo, dan rutan 3. Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik 4. Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik 5. Terlaksananya layanan inovasi marawa nagari khusus di kantor wali nagari untuk membantu warga yang gagap teknologi
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) : a. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 419.031 jiwa b. Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP el laki-laki 3.242 jiwa, perempuan 2.588 jiwa dan yang belum memiliki KIA laki-laki 23.536 jiwa, perempuan 21.079 jiwa c. Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 135 orang/ hari, terdiri dari 60 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil dan 75 Orang yang melakukan pelayanan secara online d. Rata-rata jumlah layanan pendaftaran penduduk setiap bulannya adalah 6.905 layanan e. Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari petugas Front office 3 orang, loket pelayanan offline 3 loket, 2 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan dan loket pelayanan Online 5 loket 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Akses : - Kendala Geografis, bagi penduduk di wilayah terpencil, jarak yang jauh menyebabkan biaya transportasi menjadi beban. - Mobilitas Terbatas, Perempuan yang memiliki peran ganda (mengurus rumah tangga dan anak) seringkali sulit datang ke kantor Disdukcapil pada jam kerja reguler. - Kesulitan kelompok rentan (lansia, disabilitas) menjangkau kantor layanan. - Dalam pengurusan dokumen KIA adanya kesulitan bagi anak-anak untuk bisa datang ke Dinas Dukcapil karena jam layanan sama dengan jam sekolah anak-anak

Partisipasi :

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kontrol :

- Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender

Manfaat :

- Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke Disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya
- Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

a. Penyebab Internal :

- Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses.
- Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Terbatasnya sarana pelayanan "jemput bola" yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah kabupaten solok.
- Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.

b. Penyebab Eksternal :

- Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dimana Masyarakat cenderung baru mengurus dokumen kependudukan (seperti KTP-el, KIA, KK, atau Akta) saat sangat mendesak atau ketika dibutuhkan sebagai syarat bantuan sosial, sekolah, dan kerja.
- Banyak kelompok masyarakat (khususnya lansia, penduduk di wilayah pelosok, yang belum mampu mengoperasikan aplikasi layanan pendaftaran penduduk online.
- Lokasi tempat tinggal penduduk yang jauh dari pusat layanan (kecamatan/dinas) menyulitkan mobilitas untuk pengurusan dokumen yang memerlukan perekaman biometrik (seperti KTP-el).

PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi		
		Tujuan	Meningkatkan keadilan akses dan kepatuhan masyarakat dalam kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk melalui kemudahan layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, serta penduduk di wilayah dengan keterbatasan geografis dan digital
		Aktifitas	- Pelaksanaan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari - Pelaksanaan layanan Jemput Bola Terpadu dengan menggelar perekaman KTP-el dan penerbitan KIA/Akta langsung di daerah terpencil, sekolah, panti jompo, dan rutan - Menyediakan loket prioritas, jalur pemandu (guiding block), kursi roda, dan

			ruang laktasi di pusat pelayanan - Menyediakan layanan inovasi marawa nagari khusus di kantor wali nagari untuk membantu warga yang gagap teknologi. - Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik - Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik
		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 891.506.380,-
			Panitia : DISDUKCAPIL
			Peserta : Perangkat Nagari, Perwakilan Masyarakat, Camat, Kepala OPD, KUA, Puskesmas, dan Pengadilan Agama
			Sarana Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer, Konsumsi, Honor narasumber. Sarana Prasarana : ruang tunggu, ruang tunggu prioritas, area parkir, area bermain anak, toilet, dan ruang laktasi.
		Out Come	- Rumusan kinerja - Meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline. - meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. - Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan (Indeks Kepuasan Masyarakat). - meningkatnya kualitas pelayanan Disdukcapil (Indeks Kepuasan Masyarakat) Indikator Kinerja - Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok  <u>ROMI HENDRAWAN.S.Sos.M.Si</u> NIP. 197311061993031002		

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
Program : PENDAFTARAN PENDUDUK	- Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el laki-laki 3.242 jiwa, perempuan 2.588 jiwa dan yang belum memiliki KIA laki-laki 23.536 jiwa, perempuan 21.079 jiwa - Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 135 orang/hari, terdiri dari : 60 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil dan 75 Orang yang melakukan pelayanan secara online - Untuk pengurusan administrasi secara langsung didominasi oleh perempuan sekitar 70 % (42 orang) dan laki-laki 30 % (18 orang) karena	Akses : - Kendala Geografis, bagi penduduk di wilayah terpencil, jarak yang jauh menyebabkan biaya transportasi menjadi beban. - Mobilitas Terbatas, Perempuan yang memiliki peran ganda (mengurus rumah tangga dan anak) seringkali sulit datang ke kantor Disdukcapil pada jam kerja reguler. - Fasilitas Fisik: sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai untuk kelompok rentan seperti ruang laktasi yang nyaman, ruang bermain anak yang representatif	- Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses - Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas - Terbatasnya sarana pelayanan "jemput bola" yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah kabupaten solok	Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dimana Masyarakat cenderung baru mengurus dokumen kependudukan (seperti KTP-el, KIA, KK, atau Akta) saat sangat mendesak atau ketika dibutuhkan sebagai syarat bantuan sosial, sekolah, dan kerja Banyak kelompok masyarakat (khususnya lansia, penduduk di wilayah pelosok, yang belum mampu mengoperasikan aplikasi layanan pendaftaran penduduk online	- Meningkatkan keadilan akses dan kepatuhan masyarakat dalam kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk melalui kemudahan layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, serta penduduk di wilayah dengan keterbatasan geografis dan digital - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan	- Pelaksanaan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari - Pelaksanaan layanan Jemput Bola Terpadu dengan menggelar perekaman KTP-el dan penerbitan KIA/Akta langsung di daerah terpencil, sekolah, panti jompo, dan rutan	- Jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el laki-laki 3.242 jiwa, perempuan 2.588 jiwa dan yang belum memiliki KIA laki-laki 23.536 jiwa, perempuan 21.079 jiwa - Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 135 orang/hari, terdiri dari : 60 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil dan 75 Orang yang melakukan pelayanan secara online	1. Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Input : Rp. 891.505.380,-

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PERGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
	laki-laki. Selain perempuan dan laki-laki dalam proses pengurusan dokumen kependudukan juga terdapat kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, disabilitas, wanita hamil dan ibu menyusui.				- Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai demi menunjang pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat	Menyediakan loket prioritas, jalur pemandu (guiding block), kursi roda, dan ruang laktasi di pusat pelayanan		
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Rata-rata jumlah layanan pendaftaran penduduk setiap bulannya adalah 6.905 layanan - Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 419.031 jiwa - Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari : (a) Front office 3 orang (b) loket pelayanan offline 3 loket, 2 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan. - loket pelayanan Online 3 loket - Petugas verifikasi dokumen online dan offline 2 orang - Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.	- Kesulitan kelompok rentan (lansia, disabilitas) menjangkau kantor layanan - Dalam pengurusan dokumen KIA adanya kesulitan bagi anak-anak untuk bisa datang ke Dinas Dukcapil karena jam layanan sama dengan jam sekolah anak-anak	- Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat - Kurangnya sarana informasi baik cetak maupun elektronik - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor	Lokasi tempat tinggal penduduk yang jauh dari pusat layanan (kecamatan/dinas) menyulitkan mobilitasi fisik untuk pengurusan dokumen yang memerlukan perekaman biometrik (seperti KTP-el)		- Pemberian Informasi melalui media cetak dan media komunikasi - Menyediakan layanan inovasi marawa nagari khusus di kantor wali nagari untuk membantu warga yang gagap teknologi - Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik - Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik	- Rata-rata jumlah layanan pendaftaran penduduk setiap bulannya adalah 6.905 layanan - Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Jumlah operator pelayanan 3 orang, 3 orang operator online, 3 orang operator offline	
Tujuan : Mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk yang inklusif dan menjangkau seluruh		Partisipasi :						
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih						

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi gender	Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet Permendagri No. 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik	terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.				Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menunjang kelancaran pelayanan Publik.		
		- Tingkat partisipasi mandiri masyarakat masih rendah sebelum ada kebutuhan administratif darurat. Kontrol : Kurangnya perhatian para pembuat kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender Manfaat : Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya 1 2 Meningkatkan kualitas				- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait		

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
		pelaksanaan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil						

Atas ini, 21 Mei 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil,



GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN : 2027

PROGRAM	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
KEGIATAN	5.02.04.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	5.02.04.2.01.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan : - Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebanyak 27 orang dengan perbandingan Laki-laki 23 orang dan perempuan 4 orang - Jumlah pegawai bidang PBB P2 dan BPHTB adalah sebanyak 8 orang dengan laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 2 orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan - Akses, adanya kesamaan peluang pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah kepada wajib pajak - Partispasi, proporsi petugas yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan - Kontrol, proporsi pejabat pemangku sub kegiatan - Manfaat, meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah b. Sebab Kesenjangan Internal - Formasi pegawai di Bapenda hasil penempatan dari BKPSDM c. Sebab Kesenjangan External - Petugas pendataan dan pendaftaran objek pajak laki-laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN	1. Tolak Ukur Adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah 2. Indikator dan Target Kinerja - Output, jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak daerah - Outcome, meningkatnya persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	Rp. 625.000.000,-
RENCANA AKSI	- Mengoptimalkan kinerja pegawai perempuan dalam pendataan dan pendaftaran objek pajak - Mengusulkan penambahan pegawai perempuan ke BKPSDM

Arosuka, 4 Mei 2026
KEPALA BAPENDA,

HENDRIYANTO, SE
 NIP. 197307271993031003

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebanyak 27 orang dengan perbandingan Laki-laki 23 orang dan perempuan 4 orang	Akses, adanya kesamaan peluang pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah kepada wajib pajak	Formasi pegawai di Bapenda hasil penempatan dari BKPSDM	Petugas pendataan dan pendaftaran objek pajak laki-laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan perempuan	Adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Mengoptimalkan kinerja pegawai perempuan dalam pendataan dan pendaftaran objek pajak	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebanyak 27 orang dengan perbandingan Laki-laki 23 orang dan perempuan 4 orang	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai bidang PBB P2 dan BPHTB adalah sebanyak 8 orang dengan laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 2 orang	Partispasi, proporsi petugas yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan				Mengusulkan penambahan pegawai perempuan ke BKPSDM	Jumlah pegawai bidang PBB P2 dan BPHTB adalah sebanyak 8 orang dengan laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 2 orang	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								

Arosuka, 4 Mei 2026

KEPALA BAPENDA
HENDRIYANTO, SE
 NIP. 197307271993031003



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERTANIAN

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telp/Fax (0755) 31147

Arosuka, 7 Mei 2026

Yth Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pembedayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Solok
Di
Koto Baru

Surat Pengantar
Nomor : 500.6/26/DISPERTA-2026

No	Naskah Dinas	Banyak nya	Keterangan
1.	Gender Analysis Pathway (GAP) Dinas Pertanian tahun 2027	1 (Satu) berkas	Dengan hormat, Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat diproses selanjutnya, terima kasih
2.	Gender Budget Statement Dinas Pertanian Tahun 2027		

Arosuka, 7 Mei 2026
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok



DESLIRIZALDI, SP. MP
NIP. 196912161999031004

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: (Dinas Pertanian) : (2027)
PROGRAM	(Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian)
KODE PROGRAM	3.27.05
KEGIATAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
HASIL/OUTPUT	1. Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti bimbingan teknis pengendalian hama tikus
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan Jumlah Penyuluh Pertanian : 70 orang Jumlah kelompok tani 1.831 Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani 46.554 orang yang terdiri atas: Laki-laki= 21.803 orang Perempuan= 24.751 orang Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki SK Penetapan Kelompok Tani 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 3. Faktor Kesenjangan a. Aspek Akses:- b. Aspek partisipasi: Pada pertemuan bimbingan teknis pengendalian hama tikus lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. c. Aspek kontrol: <i>Anggota kelompok tani yang perempuan lebih banyak dari laki-laki</i> d. Aspek manfaat: Manfaat bimbingan teknis pengendalian hama tikus dirasakan manfaatnya oleh petani perempuan 4. Penyebab Internal Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk pengendalian hama tikus. 5. Penyebab Eksternal: a. Pekerjaan pengendalian OPT hama tikus cenderung dilakukan oleh perempuan b. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan lahan .

RENCANA AKSI	Komponen 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	<i>Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi PHT untuk pengendalian hama tikus melalui kegiatan Bimbingan Teknis(Bimtek)</i>
		Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000,-
	Total anggaran		Rp. 50.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Diambil dari GAP langkah 9) Output: <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)tanaman pangan yang dikendalikan</i> Outcome <i>Menurunnya luas serangan OPT</i>		

Arosuka, 7 Mei 2026
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok



DESLIRIZALDI, SP. MP
NIP. 196912161999031004

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERTANIAN TAHUN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (<i>Baseline</i>)	Indikator Kinerja
Kegiatan: Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Pertanian 70 orang	Faktor kesenjangan: 1. Aspek Akses:- 2. Aspek partisipasi Pada pertemuan bimbingan teknis lebih banyak perempuan (70%) dibandingkan laki-laki (30%) 3. Aspek kontrol:	Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk pengendalian hama tikus	1. Pekerjaan pengendalian OPT Tanaman Pangan cenderung dilakukan oleh perempuan 2. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan lah	Reformulasi tujuan 1. Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. 2. Meningkatnya jumlah petani laki-laki pada kelompok tani yang mengikuti Bimbingan Teknis	Meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi PHT untuk pengendalian hama tikus dengan melaksanakan Bimtek PHT komposisi peserta laki-laki dan perempuan (60:40)	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Laki-laki= 17.646 orang Perempuan= 18.523 orang Jumlah Penyuluh Pertanian 70 orang	Input: Rp. 50.000.000 Output: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Hortikultura yang dikendalikan. Outcome Menurunnya luas serangan OPT
Sub Kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Jumlah kelompok tani: 1.831 Jumlah anggota: 46.554 orang Laki-laki= 21.803 orang Perempuan= 24.751 orang SK Penetapan Kelompok							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Hortikultura dan Perkebunan Tujuan Kegiatan: Meningkatkan pengendalian dan penanggulan gan bencana pertanian	<i>tani</i>	<i>tani yang perempuan-an lebih banyak dari laki-laki</i> 4. Aspek manfaat: Manfaat bimbingan teknis pengendalian hama tikus dirasakan manfaat-nya oleh Petani laki-laki						

Arosuka, 7 Mei 2026
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok



DESLIRIZALDI, SP. MP
NIP. 196912161999031004

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2027**

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK
ALAMAT	Jln. Raya Solok-Padang KM. 5 Koto Baru
TAHUN	2027
ANGGARAN	
PROGRAM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
KODE PROGRAM	3.31.02
KEGIATAN	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
HASIL/OUTPUT	Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Solok tahun 2027 sebanyak 4.883 IKM - Data jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 6.520 orang - Data jumlah tenaga kerja yang laki-laki sebanyak 2.590 orang - Data jumlah tenaga kerja yang perempuan sebanyak 3.930 orang Isu dan Faktor Kesenjangan Gender : 1. Faktor Kesenjangan - Tidak Semua peserta bisa mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok karena masalah Ketersediaan Anggaran - Peserta Perempuan memiliki minat yang tinggi dibandingkan peserta laki-laki untuk mengikuti pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten Partisipasi - Peserta perempuan lebih banyak mengikuti kegiatan pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten - Masih rendahnya minat IKM laki-laki untuk mengikuti pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten

	<u>Kontrol</u> - Masih rendahnya pembinaan Dinas dalam meningkatkan IKM yang berkompeten karena keterbatasan anggaran <u>Manfaat</u> - Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan IKM akan pentingnya untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten 2. Penyebab Internal - Kurangnya kesadaran diri Peserta untuk mengikuti pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten - Peserta merasa pelatihan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan SDM 3. Penyebab Eksternal - Tidak ada analisa kebutuhan dalam penyusunan program kegiatan - Tidak adanya pelatihan lanjutan terhadap kegiatan dimaksud	
PERENCANAAN KEGIATAN	Komponen 1	Pendataan bagi IKM yang akan mengikuti Pelatihan untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten
		Input Rp. 500.000.000,-
		Output Industri Kecil Menengah (IKM)
		Outcome Tersedianya data base peserta pelatihan bagi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten
	Komponen 2	Kegiatan Pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten
		Input Rp. 500.000.000,-
		Output Peserta yang mengikuti Pelatihan
		Outcome Pelaksanaan Pelatihan
	Komponen 3	Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Lanjutan terhadap IKM yang mengikuti pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM mempunyai SDM yang berkompeten
		Input Rp. 500.000.000,-
		Output Jumlah monitoring dan evaluasi serta pembinaan lanjutan terhadap Peserta pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten
		Outcome Terlaksananya monev bagi Peserta pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang

		mempunyai SDM yang berkompeten
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	1. <i>Pendataan peserta yang akan mengikuti pelatihan bagi IKM untuk menjadi IKM yang mempunyai SDM yang berkompeten di Kabupaten Solok</i> 2. <i>Analisa Kebutuhan yang berhubungan dengan KIE Konseling yang diinginkan</i> 3. <i>Pelaksanaan KIE Konseling sesuai analisa kebutuhan</i> 4. <i>Bantuan Sarana Pendukung bagi Peserta yang akan mengikuti KIE Konseling</i> 5. <i>Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Lanjutan terhadap Peserta yang mengikuti KIE Konseling</i>	



KEPALA DINAS
RADIYATUL HAYAT, SH, MH
 Pembina Utama Muda (IV.c)
 Nip. 19690620 199308 2 001

GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Tahun : 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
KEGIATAN : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Data Yang Dibutuhkan : 1. Data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Solok 2. Data jumlah IKM yang laki-laki 3. Data jumlah IKM yang perempuan 4. Aktiv dan yang pasif	<u>Akses :</u> Belum semua IKM yang ada di Kabupaten Solok mau menjadi IKM yang berkompeten Kurang nya minat IKM laki-laki mau menjadi IKM yang berkompeten	- Kurangnya kuantitas IKM laki-laki untuk menjadi IKM yang berkompeten - Kurangnya minat IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten karena kurang sadar akan pentingnya kualitas produk kedepannya - Kurangnya pembinaan ke IKM karena munculnya IKM baru yang	1. laki-laki cenderung lebih cepat bosan mengikuti pelatihan produk 2. Karena jauhnya jarak IKM ke tempat pelatihan 3. Menurunnya minat IKM yang aktif karena kurangnya promosi menyebabkan IKM yang	Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten	1. Membentuk tim enumerator IKM per kecamatan 2. Sosialisasi ke IKM untuk mengingatkan akan pentingnya menjaga kualitas produk 3. Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor 4. Peningkatan SDM (Kualitas dan	1. IKM yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan sebanyak 32 % (1.562 IKM) 2. IKM yang laki-laki sebanyak 68 % (3.321 IKM) 3. Jumlah IKM seluruhnya 4.883	Pembinaan kepada IKM dan meningkatkan kesadaran IKM untuk ikut menjadi IKM yang berkompeten demi kelangsungan produk kedepannya In put Membangkitkan semangat IKM yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan Out Put Tersedianya daftar IKM yang akan
SUB. KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		<u>Partisipasi</u> Masih rendahnya partisipasi IKM laki-laki yang mau menjadi IKM						

Term Of Reference (TOR) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tahun 2027



TUJUAN : Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten SASARAN : Pelaku Usaha yang Laki-laki		Yang berkompeten <u>Kontrol</u> Masih rendahnya minat IKM yang laki-laki mau menjadi IKM yang berkompeten <u>Manfaat</u> DKUKMPP setiap tahun memfasilitasi IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten	belum terdaftar di DKUKMPP	gulung tikar		Kuantitas) dalam pembinaan terhadap IKM	digunakan sebagai acuan untuk pemberian pembinaan dan bantuan pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor
--	--	--	----------------------------	--------------	--	---	---

Term Of Reference (TOR) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tahun 2027





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Raya Solok-Padang KM 20, Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Email: dlh@solokkab.go.id website: dlh.solokkab.go.id

Arosuka, 30 April 2026

Yth. Kepala Dinas DPPKB-P3A

di

Arosuka

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.3.6/ /DLH-2026

NO	ISI SURAT/ BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyampaian GAB - GBS Matrix Gender & Format GBS	2 (Dua) berkas	Bersama ini kami sampaikan Penyampaian Matrix Gender Analisis Pathway (GAP) dan Format GBS untuk kegiatan 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Solok

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
sch		4/5-26.
Fungsional		4/5/26
Operator		04/5-26

KEPALA,

ASNUR, SH., MM.
NIP. 19581209 199312 2 001

**FORMAT GBS
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok						
Tahun Anggaran	:	2027						
Program	:	Pengelolaan Persampahan						
Kode Program	:	2.11.11.2.01.04						
Kegiatan	:	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
Output	:	Terlaksananya sosialisasi terhadap 125 orang						
Analisis Situasi	:	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilih Gender) 2. Peran perempuan lebih banyak pada sektor rumah tangga (pemilahan sampah) Lokasi Tempat dilaksanakannya sosialisasi (sedang di Survey) 3. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender serta Partisipasi laki-laki dalam pengambilan keputusan lingkungan masih rendah 4. 1. Kesenjangan Partisipasi : - Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, lebih banyak dikerjakan oleh perempuan yaitu lebih kurang 80 % 2. Kesenjangan Manfaat : Dimana manfaat dari kegiatan ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan a. penyebab internal : 1. Penyampaian Informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik 2. Mindset laki-laki terkait pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan b. Penyebab Eksternal : 1. Setiap sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, pihak nagari lebih sering mengirim kader perempuan, karena kader laki-laki jumlah nya sedikit dan umumnya tidak aktif. 2. Sarana pemilahan sampah organik dan non organik belum tersedia di rumah tangga						
Rencana Aksi	:	<table><tr><td>Komponen</td><td>Tujuan</td><td>Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah (25 orang) per Lokasi Kegiatan</td></tr><tr><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 23.000.000,-</td></tr></table>	Komponen	Tujuan	Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah (25 orang) per Lokasi Kegiatan		Alokasi Anggaran	Rp. 23.000.000,-
Komponen	Tujuan	Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah (25 orang) per Lokasi Kegiatan						
	Alokasi Anggaran	Rp. 23.000.000,-						

Arosuka, 30 April 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup


ASNUR, SH. M.M
 NIP. 19681209 199312 2 001

MATRIK
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tujuan : Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Sasaran Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga	Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Data informasi pengelolaan lingkungan hidup terkait antara lain : Pemilahan pengolahan Sampah di Bank sampah 1. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan 2. Masyarakat tidak memilah sampah dari rumah 3. Masih adanya kesenjangan peran laki-laki & perempuan dalam memilah sampah 4. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam pengelolaan sampah rumah tangga	1. Sarana - Kurangnya sarana dalam pengelolaan sampah di masyarakat 2. Partisipasi - Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan lebih kurang (80 %) 3. Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, keterlibatan laki-laki hanya 20%	1. Kurangnya sosialisasi tentang Juknis pengelolaan sampah di Bank sampah 2. Kurangnya Jumlah petugas sampah 3. Kurangnya sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur, Baliho, Banner dan Media) 4. Kurangnya Koordinasi dengan lintas sektor 5. Penyampaian informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik 6. Masih kurangnya pemahaman Laki-laki terkait pengelolaan	1. Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah 2. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan	Meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga baik bagi laki laki maupun perempuan melalui bank sampah Tidak mempertimbangkan kesenjangan Gender dan menyebut kelompok sasaran secara spesifik serta tidak menjawab masalah partisipasi perempuan	1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga (25 orang) per lokasi kegiatan 2. Peningkatan sarana pemilahan sampah di rumah tangga 3. Pengadaan sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur, Baliho, Banner dan Media Sosial) 4. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor	1. Jumlah Bank sampah adalah sebanyak 15 total jumlah pengurus 150 orang 2. Jumlah TPA Regional di kabupaten Solok ada 1 Lokasi 3. Baseline tahun 2027 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan persampahan, namun kesenjangan masih terlihat pada aspek kontrol dan peran strategis sehingga intervensi kebijakan tetap diperlukan mencapai kesetaraan gender secara penuh.	1. Sosialisasi pengelolaan sampah untuk tahun 2027 direncanakan di 5 lokasi di Kab. Solok sebanyak 125 orang Input Rp.23.000.000,- Output : Terlaksananya sosialisasi terhadap 125 orang Outcome : Meningkatnya Pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat

			sampah rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan 7. Tidak tersedianya Baseline partisipasi Gender					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, 30 April 2026

KEPALA DINAS



ASNUR, SH, M.M

NIP. 19681209 199312 2 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TAHUN : 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pembuka Data Wawasan 1. Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan 2. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang	Isu Gender : Masih Tingginya Angka Pengangguran di kalangan Laki-laki			Kebijakan dan Rencana Aksi ke depan: Menurunnya Angka Pengangguran di kalangan Perempuan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah 3. Masih Banyaknya angkatan kerja yang belum bekerja yang dapat dilihat Data Solok dalam Angka 4. Angka Pengangguran Terbuka sesuai dengan Kabupaten Solok dalam angka pada tahun 2025 mengalami penurunan 0,21 % dari tahun sebelumnya	Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh Partisipasi : Kurang Minat bagi laki-laki dalam menciptakan lapangan usaha mandiri	1. Masih Kurangnya Paket Pelatihan yang diadakan 2. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Instruktur yang ada 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Balai Latihan Kerja	1. Masih adanya keinginan untuk bekerja sebagai pekerja dari pada menciptakan usaha kerja mandiri 2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat	Meningkatnya Kompetensi dan keahlian angkatan kerja bagi semua angkatan kerja	1. Mendata minat Pemuda dan pemuda atau calon tenaga kerja melalui Trainning Need Analysis 2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang diselenggarakan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2025 : 77,14 Laki-laki : 87,30 Perempuan : 66,95 Tingkat Pengangguran tahun 2025 : 4,70 Laki-laki : 3,50 Perempuan : 6,26 Jumlah Instruktur : 8 org Laki-laki: 3 org Perempuan: 5 org Yang sdh bersertifikat : 6 org	Pelaksanaan Tarining Need Analysis serta penyebaran informasi tentang pelatihan - pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sasaran Input : Rp.263.000.000,- Out Put : Terlaksananya Training Need Analysis serta penyebaran informasi pelatihan-pelatihan Out Come : - Terdatanya minat pemuda-pemudi calon tenaga kerja di kabupaten Solok Tersebaranya informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) - Terlaksananya Paket pelatihan untuk meningkatkan lapangan usaha bagi laki-laki
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Angkatan Kerja Tahun 2025 : 243.322 Laki-laki : 137.941 Perempuan: 105.381	Kontrol : Kurang nya dukungan keluarga dalam penciptaan						

Yang Bekerja: 231.896 Laki-laki: 133.112 Perempuan: 98.748 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2025 : 77,14 Laki-laki : 87,30 Perempuan : 66,95 Tingkat Pengangguran tahun 2025 : 4,70 Laki-laki : 3,50 Perempuan : 6,26	lapangan usaha mandiri Manfaat : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja						
--	---	--	--	--	--	--	--

Arosuka,

Mer 28 2024
Kepala
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Solok
Drs. ALIBER MULYADI
NIP: 196612201994031005

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GANDER BUDGET STATEMENT)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

TAHUN ANGGARAN : 2025

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER GANDER BUDGET STATEMENT			
SKPD	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
TAHUN ANGGARAN	2025		
PROGRAM	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		
KODE PROGRAM	2.07.03		
KEGIATAN	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi		
SUB KEGIATAN	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		
HASIL/OUT PUT	Meningkatnya tenaga kerja terampil, siap pakai dan mandiri secara berimbang antara laki-laki dan perempuan		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan - Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan - Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah - Masih banyaknya angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan yang dapat dilihat dari data Solok dalam Angka Angkatan Kerja Tahun 2025 : 243.322 Laki-laki : 137.941 Perempuan: 105.381 Yang Bekerja: 231.896 Laki-laki: 133.112 Perempuan: 98.748 Bukan angkatan kerja tahun 2025: Yang sekolah : 72.087 Laki-laki : 20.066 Perempuan : 52.021 2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender A Faktor kesenjangan Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh Partisipasi : Belum meratanya kesempatan kerja bagi perempuan dibandingkan laki-laki Kontrol : Kurang nya dukungan keluarga Manfaat : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja B Penyebab Internal 1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Instruktur yang ada 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang representatif C Penyebab Eksternal 1. Kurang nya minat dari angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja mandiri dan masih banyak yang berharap untuk menjadi ASN 2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat		
RENCANA AKSI	Komponen 1	Tujuan	Terdatanya minat pemuda pemudi/calon tenaga kerja Kab Solok melalui Tranning Need Analysis serta menyebarkan informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di BIK
		Alokasi Anggaran	Rp. 174.059.862,-
		Total Anggaran	Rp. 174.059.862,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	- Meningkatnya Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja - Menurunnya Angka Pengangguran		


 Kepala
 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Solok
 Drs. ALIBER MULYAO
 NIP. 19681021 199403 1 005

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2027

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK : Tahun Anggaran 2027
PROGRAM	REHABILITASI SOSIAL
KODE PROGRAM	1.06.04
KEGIATAN	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
SUB KEGIATAN	Penyediaan Permakanan
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan • Peraturan menteri sosial republik indonesia Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2017 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial • Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. • Pemberian Bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok Kepada Lansia Terlantar • Jumlah Lansia Terlantar yang mendapatkan Sosial berupa kebutuhan pokok, Lansia Terlantar Perempuan sebanyak 80 orang, dan lansia terlantar laki-laki sebanyak 70 Orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : - Belum terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia <u>PARTISIPASI</u> - Lansia terlantar perempuan lebih mandiri - Lansia terlantar laki-laki cenderung kurang mandiri

	<u>KONTROL</u> - Masih rendahnya kepedulian keluarga dan Lingkungan kepada Lansia Terlantar - Keterbatasan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lansia terlantar <u>MANFAAT</u> Memberikan dukungan agar lansia hidup lebih mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik b. Penyebab Internal - Kurangnya kesadaran Lansia dalam perencanaan keuangan di masa pensiun sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya - Keterbatasan akses terhadap bantuan sosial karena lansia bertempat tinggal di daerah terpencil c. Penyebab Eksternal - Ketidakmampuan ekonomi/ kemiskinan dan kurangnya perhatian lingkungan sekitar terhadap lansia terlantar - Kurangnya akses layanan kesehatan dan dukungan sosial kepada lansia terlantar		
	Komponen	Pelaksanaan Pemberian bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok sesuai dengan analisa kebutuhan	
		Input	Rp. 300.000.000
		Output	Lansia Terlantar Yang mendapatkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok
		Outcome	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	1. <i>Pendataan Lansia Terlantar yang akan diberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok</i> 2. <i>Analisa Kebutuhan yang berhubungan dengan pemberian bantuan sosial</i> 3. <i>Pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan sosial kepada lansia terlantar</i> 4. <i>Bantuan Sarana Pendukung bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan pokok</i> 5. <i>Monitoring dan Evaluasi lansia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan pokok</i>		



Arosuka, April 2026
Kepala Dinas Sosial

Ir. DESMALIA RAMADHANUR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712031994032003

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN / PROGRAM KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Factor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program: Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Peraturan menteri sosial republik indonesia Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2017 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang	AKSES Belum terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia PARTISIPASI Lansia terlantar perempuan lebih mandiri Lansia terlantar laki-laki cenderung kurang mandiri KONTROL Masih rendahnya kepedulian	1) Kurangnya kesadaran Lansia dalam perencanaan keuangan di masa pensiun sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya 2) Keterbatasan akses terhadap bantuan sosial karena lansia bertempat tinggal di daerah terpencil	1) Ketidakmam- puan ekonomi/ kemiskinan dan kurangnya perhatian lingkungan sekitar terhadap lansia terlantar 2) Kurangnya akses layanan kesehatan dan dukungan sosial kepada lansia terlantar	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar dalam meningkatkan Lesejahteraan Sosial	1) Akan dilaksanakan Pemberian Bantuan Sosial berupa kebutuhan Pokok secara berkala 2).Pelaksanaan Kegiatan sesuai analisa kebutuhan Lansia Terlantar	Pelaksanaan Pemberian bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok dilaksanakan 2 kali dalam setahun yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok kepada Lansia Terlantar sebanyak: - Lansia Terlantar Laki-laki 70 Orang - Lansia Terlantar Perempuan 80 Orang	Pelaksanaan Pemberian bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok sesuai dengan analisa kebutuhan Rp. 300.000.000 Output : -Lansia Terlantar Yang mendapatkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok

Tujuannya: Membantu Lansia memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban pengeluaran mereka	selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pemberian Bantuan Sosial berupa kebutuhan pokok Kepada Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang mendapatkan Sosial berupa kebutuhan pokok	keluarga dan Lingkungan kepada Lansia Terlantar Keterbatasan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lansia terlantar MANFAAT Memberikan dukungan agar lansia hidup lebih mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik						-Outcome : -Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
--	---	---	--	--	--	--	--	--

Lansia Terlantar Perempuan : 80								
Lansia Terlantar Laki-laki : 70								



Arosuka, April 2026
Kepala Dinas Sosial

B. DESMALIA RAMADHANUR

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671203 199403 2 003

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK
TAHUN : 2027

Program	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kode Program	2.16.02
Analisis Situasi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat 4. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tahun 2026 Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan masih belum seimbang. Dimana jumlah wartawan yaitu sebanyak 80 orang dengan rincian 61 (76,25%) laki-laki dan 19 (23,75%) perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kerjasama pemerintah dengan media/wartawan 5. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.
	Faktor Kesenjangan Akses: Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebar Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah. Kontrol: Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi. Manfaat: Manfaat dari informasi yang disebar belum merata bagi perempuan.
	Kesenjangan Internal Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender. Kesenjangan Eksternal 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan / media. 2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan
Capaian Program	1. Tolak Ukur : - Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebar. - Mendorong media cetak, online, dan elektronik untuk lebih inklusif dalam memuat informasi yang mewakili perempuan.

	2. Indikator dan target kinerja Output: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan pers 2. Terdaftar di dinas kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media Outcome: Meningkatnya jumlah kegiatan relasi media yang melibatkan media yang terverifikasi Dewan Pers, terdaftar di Dinas Kominfo, dan aktif dalam kegiatan relasi media.
Jumlah Anggaran	Rp. 1.483.574.906,- (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah)
Rencana Aksi	1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita.. 2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender.
	Masukan : Rp. 1.483.574.906,-
	Output : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan pers 2. Terdaftar di dinas kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media
	Outcome : Meningkatnya jumlah kegiatan relasi media yang melibatkan media yang terverifikasi Dewan Pers, terdaftar di Dinas Kominfo, dan aktif dalam kegiatan relasi media."

Arosuka, 7 Mei 2026

Kepala

SUSI SOFIANTI SANDANI, SH, MM
NIP 19720319 199304 2 004

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2027

Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan : Bidang Komunikasi dan Informatika Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota Sub kegiatan: Relasi Media Tujuan: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat 4. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tahun 2026 Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan masih belum	Akses: Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebarkan Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah. Kontrol: Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi. Manfaat: Manfaat dari informasi yang disebarkan belum	Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender.	1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan / media. 2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan	1. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan. 2. Mendorong media cetak, online, dan elektronik untuk lebih inklusif dalam memuat informasi yang mewakili perempuan..	1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita.. 2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender.	1. Tahun 2024 jumlah wartawan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 68 orang (72,34%) laki-laki dan 26 orang (27,66%) perempuan 2. Tahun 2025 Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan masih belum seimbang. Dimana jumlah wartawan yaitu sebanyak 112 orang dengan rincian 83 (74,11%) laki-laki dan 29 (25,89%) perempuan	Input : Rp. 1.483.574.906,- Output: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi diwan pers 2. Terdaftar di dinas kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media Outcome: Meningkatnya jumlah kegiatan relasi media yang melibatkan media yang terverifikasi Dewan Pers,

	seimbang. Dimana jumlah wartawan yaitu sebanyak 80 orang dengan rincian 61 (76,25%) laki-laki dan 19 (23,75%) perempuan. Data tersebut menunjukan bahwa masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kerjasama pemerintah dengan media/wartawa 5. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.	merata bagi perempuan.						terdaftar di Dinas Kominfo, dan aktif dalam kegiatan relasi media."
--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Aropana, 7 Mei 2026
Kepala

SUSI SOFIANTI, S.Pd, Nl, SH, MM
NIP 19720319 199303 2 004

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
DINAS PERIKANAN PANGAN
TAHUN 2027**

PROGRAM	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KODE PROGRAM		3.25.04
ANALISIS SITUASI	1	Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan fungsinya berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk pembudidaya Ikan guna memberikan keyakinan bahwa OPD telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
	2	Dalam upaya pengembangan kapasitas pembudidaya Ikan kecil, terkendala dg situasi adanya norma sosial yg membatasi perempuan dalam mengerjakan sesuatu dan belum maksimalnya dorongan orang tua keluarga dan tokoh terkait
	Isu dan faktor kesenjangan gender	
	1	Adanya norma sosial yang membatasi perempuan dalam mengerjakan sesuatu
	2	Belum maksimalnya dorongan orang tua, keluarga dan tokoh terkait
CAPAIAN PROGRAM	Tolak Ukur	
	1	Meningkatnya kualitas SDM pembudidaya ikan dalam Cara Budidaya dan Pembenihan Ikan yang baik
	Indikator dan Target Kinerja:	
	1	Terlaksananya pelatihan serta pembinaan terhadap pembudidaya Ikan
	2	Terlaksananya pembinaan pembudidaya Ikan yang dilatih dan diberikan informasi
	3	Terdatanya jumlah pembudidaya yang bersertifikasi CBIB/CPIB di Kabupaten Solok
		Tersebar nya Informasi produksi perikanan yang bersertifikat CBIB/CPIB
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)	
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
	Masukan	: Dana Rp. 42.000.000,-
	Keluaran	: Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas
	Hasil	: Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih dalam budidaya dan peningkatan daya saing usaha perikanan

Koto Baru, Juni 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
Kepala,


Ir. SYOUFI RLMM

NIP. 19701115 200502 2 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DNAB PERIKANAN DAN PANGKAS
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022**

LAMBEK 1	LAMBEK 2	LAMBEK 3	LAMBEK 4	LAMBEK 5	LAMBEK 6	LAMBEK 7	LAMBEK 8	LAMBEK 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pemuka Wilayah	Isu Gender : Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan			Kebijakan dan Rencana Kegiatan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Bebas Kesenjangan Internal	Bebas Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
Program: Program Pengelolaan Perikanan Subdaya Kegiatan: Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kaki Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kaki Tujuan: Tercapainya jumlah mutu pada usaha perikanan Peningkatan Produk perikanan Subdaya	* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40 Tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan * Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik * Masih banyaknya pelaku budidaya yang belum memperoleh sertifikat CSB/CPSB * Petaku usaha perikanan tahun 2020 Laki-laki : 1755 Perempuan : 418	Akses: Berkas kerja yang lebih memudahkan tenaga Partisipasi: - Belum banyak kesempatan kerja bagi perempuan di bidang perikanan Kontrol: Kurangnya dukungan keluarga Manfaat: - Meningkatkan kompetensi dan keahlian pelaku usaha perikanan dan meningkatkan jumlah produksi yang berkualitas dan bernilai tinggi	- Kurangnya kualitas dan kuantitas pelaku usaha perikanan - Kurangnya akses dan prestasi yang konsisten	- Adanya norma sosial yang menghalangi perempuan dalam meningkatkan usaha - Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga dan tokoh lokal	Meningkatkan kualitas SDM pembudidayaan dalam Cara Subdaya dan Pembenihan Ikan yang Baik Meningkatkan jumlah CSB/CPSB pembudidayaan ikan	- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan bagi petani dan spe tu CSB/CPSB - Mendata jumlah pembudidaya ikan dalam upaya melakukan pembenihan kerja bagi perempuan dan laki-laki - Menentukan jumlah kuota petani pelatihan dan engapannya - Meningkatkan koordinasi dengan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah Peternak/petani usaha perikanan laki-laki 88,87% dan Perempuan 11,13%	- Peningkatan pelatihan serta pembinaan terhadap pembudidaya ikan - Input: Rp 54.200.211,- (Anggaran Tahun 2023) Rp. 42.000.000,- (Rencana Anggaran Tahun 2027) - Output: Terlelisnya pembinaan pembudidaya ikan yang telah dan diberikan internal - Outcome : Terlelisnya jumlah pembudidaya yang bersertifikat CSB/CPSB di Kabupaten Solok - Terselenggaranya informasi produk perikanan yang bersertifikat CSB/CPSB

Koto Baru, Juni 2023
DNAB PERIKANAN DAN PANGKAS
 Solok

 NIP. 19531115 200602 2 000

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok
TAHUN ANGGARAN	2027
PROGRAM	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif
KODE PROGRAM	3.26.05
KEGIATAN	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
SUB- KEGIATAN	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
ANGGARAN SUB - KEGIATAN	<i>Rp. 162.500.000</i>
HASIL/OUTPUT	1. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif Gender agar mampu memberikan pelayanan dan menghasilkan produk parekraf yang berkualitas dan berdaya saing.
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) : Data Tahun 2025: • Pelaku usaha parekraf laki-laki: 145 orang (66%) • Pelaku usaha parekraf perempuan: 75 orang (34%) • Peserta pelatihan tahun sebelumnya: laki-laki 70%, perempuan 30% • Posisi pengambilan keputusan Pokdarwis didominasi laki-laki sebesar 75% Kesenjangan Akses : Perempuan memiliki akses terbatas terhadap informasi, transportasi, dan waktu mengikuti pelatihan Kesenjangan Partisipasi, yaitu : Tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan masih rendah. Kesenjangan Kontrol : Pengambilan keputusan usaha wisata lebih banyak ditentukan laki-laki Penyebab Internal : • Jadwal pelatihan belum mempertimbangkan kebutuhan perempuan. • Belum tersedia fasilitas ruang laktasi/penitipan anak.

	• Sosialisasi pelatihan masih melalui kelompok yang didominasi laki-laki. Materi pelatihan belum memasukkan perspektif gender penyebab Eksternal : • Budaya masyarakat masih menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik. • Rendahnya dukungan keluarga terhadap perempuan untuk mengikuti pelatihan. • Keterbatasan akses transportasi dan teknologi informasi. • Stereotip bahwa pengelolaan wisata lebih cocok dilakukan laki-laki		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Tujuan	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara setara dan inklusif bagi laki-laki dan perempuan melalui pelatihan yang responsif gender sehingga tercipta peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang Adil
		Aktifitas	• Menetapkan kuota minimal peserta perempuan sebesar 40%. • Menyesuaikan jadwal pelatihan agar ramah bagi perempuan. • Menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi/childcare. • Melakukan sosialisasi kepada kelompok perempuan. • Menyusun materi pelatihan berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan. • Mendorong keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Pokdarwis
		Sumberdaya (Output)	Panitia: Disparbud
			Peserta : Pelaku Parekraf

			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer
		Outcome	Rumusan kinerja • Persentase peserta perempuan tahun sebelumnya: 30% • Persentase perempuan dalam kepengurusan Pokdarwis: 25 Indikator Kinerja Minimal 40% peserta pelatihan adalah perempuan. • Peningkatan partisipasi perempuan sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. • Minimal 30% posisi kepengurusan Pokdarwis diisi perempuan. • Peningkatan pendapatan usaha peserta perempuan minimal 15%.

Arosuka, 20 Mei 2026
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KEPALA ,


MARCOS SOPHAN, S.Pt, M. Si
NIP. 197403141999031006

GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEGIATAN : <i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i> TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif Gender agar	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator
	Data Tahun 2025: • Pelaku usaha parekraf laki-laki: 145 orang (66%) • Pelaku usaha parekraf perempuan: 75 orang (34%) • Peserta pelatihan tahun sebelumnya : laki-laki 70%, perempuan	Akses: Perempuan memiliki akses terbatas terhadap informasi, transportasi, dan waktu mengikuti pelatihan. Partisipasi Tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan masih rendah. Kontrol Pengambilan	• Jadwal pelatihan belum mempertimbangkan kebutuhan perempuan. • Belum tersedia fasilitas ruang laktasi/penitipan anak. • Sosialisasi pelatihan masih melalui kelompok yang didominasi laki-laki. • Materi pelatihan belum memasukkan perspektif gender.	• Budaya masyarakat masih menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik. • Rendahnya dukungan keluarga terhadap perempuan untuk mengikuti pelatihan. • Keterbatasan akses transportasi dan teknologi	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara setara dan inklusif bagi laki-laki dan perempuan melalui pelatihan yang responsif gender sehingga tercipta peningkatan akses, partisipasi,	• Menetapkan kuota minimal peserta perempuan sebesar 40%. • Menyesuaikan jadwal pelatihan agar ramah bagi perempuan. • Menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi/childcare . • Melakukan sosialisasi kepada kelompok	• Persentase peserta perempuan tahun sebelumnya: 30% • Persentase perempuan dalam kepengurusan Pokdarwis: 25%	• Minimal 40% peserta pelatihan adalah perempuan. • Peningkatan partisipasi perempuan sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. • Minimal 30% posisi kepengurusan Pokdarwis diisi perempuan. • Peningkatan

mampu memberikan pelayanan dan menghasilkan produk parekraf yang berkualitas dan berdaya saing.	30% • Posisi pengambilan keputusan Pokdarwis didominasi laki-laki sebesar 75%	keputusan usaha wisata lebih banyak ditentukan laki-laki		informasi. • Stereotip bahwa pengelolaan wisata lebih cocok dilakukan laki-laki.	kontrol, dan manfaat yang adil	perempuan. • Menyusun materi pelatihan berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan. • Mendorong keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Pokdarwis.	pendapatan usaha peserta perempuan minimal 15%.
PROGRAM: Program Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							

Arosuka, 20 Mei 2026

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KEPALA,**



MARCOS SOPHAN, S.Pt, M. Si
NIP. 197403141999031006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawancara	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Baris Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Dasar Hukum UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Akses	Kurang sosialisasi PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat	Jumlah petugas PAM lalin (laki – laki dan perempuan) (91% : 9%)	Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Kurangnya petugas PAM lalin sementara Banyaknya 16 titik PAM lalin Rutin dengan 31 Petugas (28 laki-laki 3 perempuan)						Input Rp. 25.000.000,
Kegiatan :	Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas PAM lalin terhadap keamanan dan keselamatan lalu lintas			Peningkatan Kualitas SDM petugas PAM lalin		Out put
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		Partisipasi	Belum semua lokasi titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas yang bisa diberikan pengamanan				Jumlah lokasi - Titik-titik PAM lalin (16 titik)	Terlaksananya sosialisasi mengenai keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Data Petugas Pengamanan lalu lintas (PAM lalin) laki-laki 45 dan Perempuan 2	Kurangnya pengetahuan pengguna jalan untuk tertib lalu lintas	Sarana dan Prasarana Petugas PAM dilapangan belum lengkap			Pengadaan sarana dan prasarana Keselamatan Lalu Lintas		Outcome :
Tujuan :							Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan lalu lintas (5% tahun)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basir Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Terwujudnya penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya	Data lokasi/ titik- titik PAM lain: 16 titik (pertimpangan di jalan nasional yang ada di Kabupaten Solok)	Kontrol :	masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral	Kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral		Melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektoral		
		Kurangnya pengawasan dari koordinator petugas PAM lain yang terlatih					Penurunan persentase angka kecelakaan lalu lintas (5% tahun)	Peningkatan Mudi dan Kualitas SDM petugas PAM lain
	Data kecelakaan lalu lintas dalam 1 tahun							Input : Rp. 55.500.000,- - Output Penambahan dan peningkatan SDM petugas PAM Tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lulusan
	Jumlah Pengawas petugas PAM dilepasan (31 orang)							- Outcome Meningkatnya partisipasi petugas PAM lain



GBS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok
Tahun Anggaran	: 2027
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kode Program	2.15.02
Kegiatan	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
Subkegiatan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Kegiatan	• Terlaksananya PPRG dan PUG oleh Pimpinan, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan • Jumlah titik Petugas Pengamanan (PAM) lalulintas di daerah rawan kecelakaan • Jumlah petugas Petugas Pengamanan (PAM) Dinas Perhubungan di Kabupaten Solok
Hasil/Output	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Analisis Situasi	1. Data pembuka wawasan Kegiatan Operasional pengamanan lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas khususnya pemantauan lalu lintas di wilayah Kabupaten Solok. Kegiatan PAM ini merupakan salah satu kegiatan utama untuk mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Solok. Lalu lintas Kabupaten Solok memiliki jam sibuk pada pagi dan sore hari, yang mana pagi hari rata-rata masyarakat melakukan aktivitas yang sama seperti berangkat ke sekolah, ke pasar, ke tempat kerja, dll. Pengguna jalan terutama perempuan seringkali kurang nyaman bila diatur oleh petugas laki – laki, sehingga mereka cenderung menghindar ketika hendak diseberangkan. Dalam hal ini perlunya responsif gender dalam pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok. 2. Faktor Kesenjangan Internal • Kurang sosialisasi PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas PAM lalin terhadap keamanan dan keselamatan lalu lintas

	• Belum semua lokasi/titik - titik rawan kecelakaan lalu lintas yang bisa diberikan pengamanan • Sarana dan Prasarana Petugas PAM difapangan belum lengkap • masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral 3. Faktor Kesenjangan Eksternal • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas		
Rencana Aksi	Komponen 1	Tujuan	1. Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalulintas.
		Alokasi Anggaran	Rp.25.0000.000,-
	Komponen 2	Tujuan	1. Pengadaan Kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalu Lintas
		Alokasi Anggaran	Rp. 55.500.000,-
	Total anggaran		Rp. 80.500.000,-
Capaian Program	Output 1. Terlaksananya sosialisasi mengenai keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalin. 3. Tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalulintas Indikator Out Come : 1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan kecelakaan 2. Meningkatnya partisipasi petugas PAM Perempuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok		

Koto Baru, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok,



MUTIACHANDONI S.STP, M.Si
NIP. 19760101 199703 1 003

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Pembinaan Perpustakaan Kegiatan: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tujuan : Pengembangan layanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan 13.713 orang TK = 538 L = 280 P = 258 SD = 1.922 L = 935 P = 987 SLTP = 545 L = 223 P = 322 SLTA = 970 L = 565 P = 405 PNS = 6.589 L = 3.050 P = 3.539 Guru = 964 L = 311 P = 653 Pengelola Perpustakaan = 339 L = 56 P = 283	- Akses Lokasi Perpustakaan jauh dari sekolah - Partisipasi laki - laki untuk datang ke perpustakaan lebih rendah dari perempuan - Kurangnya koleksi buku yang diminati	1. Keterbatasan anggaran untuk penambahan koleksi yang diminati. 2. Mobil Perpustakaan Keliling yang dimiliki sebanyak 2 (dua) unit tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan sekolah yang ada 3. Terbatasnya akses ke layanan digital 4. Tidak meratanya infrastruktur dan sumber daya perpustakaan	1. Masih rendahnya budaya literasi Masyarakat 2. Kesenjangan sosial ekonomi Masyarakat 3. Pengaruh perkembangan teknologi informasi (Daya Tarik televisi dan smart phone) 4. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya membaca dan cara menumbuhkan minat baca	Meningkatkan Minat dan budaya mlayanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat.	Melakukan Penambahan titik lokus kunjungan layanan perpustakaan keliling Pengusulan penambahan anggaran koleksi	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan TK = 538 L = 280 P = 258 SD = 1.922 L = 935 P = 987 SLTP = 545 L = 223 P = 322 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling 2.831 orang L = 1.265 P = 1.566	Kegiatan Melakukan pelayanan Perpustakaan keliling pada Satuan Pendidikan Dasar Indikator: Jumlah lokus pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling Input : • Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling: Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah) • Pengadaan Koleksi buku Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umum = 1.191 L = 760 P = 431 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling 2.831 orang L = 1.265 P = 1.566							Output: Meningkatkan layanan perpustakaan keliling pada satuan Pendidikan dasar dan masyarakat.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


EKO GUNANTO, S.Pd
 Pembina Utama Muda, IV.c
 NIP. 197005242000031002

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

**NAMA OPD
TAHUN**

**: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. SOLOK
2027**

Program	Pembinaan Perpustakaan	
Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
Anggaran Sub Kegiatan	Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta Rupiah)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah lokus pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	
Output Kegiatan	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling pada satuan Pendidikan dasar dan masyarakat	
Analisis Situasi	<u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u> 1. Akses Lokasi Perpustakaan jauh dari sekolah 2. Partisipasi laki – laki untuk datang ke perpustakaan lebih rendah dari perempuan 3. Kurangnya koleksi buku yang diminati <u>Penyebab Internal :</u> 1. Keterbatasan anggaran untuk penambahan koleksi yang diminati 2. Mobil Perpustakaan Keliling yang dimiliki sebanyak 2 (dua) unit tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan sekolah yang ada 3. Terbatasnya akses ke layanan digital 4. Tidak meratanya infrastruktur dan sumber daya perpustakaan <u>Penyebab Eksternal :</u> 1. Masih rendahnya budaya literasi Masyarakat 2. Pengaruh perkembangan teknologi informasi (Daya tarik televisi dan smart phone) 3. Kesenjangan sosial ekonomi Masyarakat 4. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya membaca dan cara menumbuhkan minat baca	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling pada Satuan Pendidikan dasar 2. Pengadaan koleksi buku
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta Rupiah)	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya layanan perpustakaan keliling pada satuan Pendidikan dasar dan masyarakat	

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


EKO GUNANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP. 197005242000031002

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok
ALAMAT	: Jln.Raya Koto Baru
TAHUN	: 2026
ANGGARAN	
PROGRAM	Program Penanggulangan Bencana
KODE PROGRAM	1.05.03
KEGIATAN	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya pengetahuan anggota TRC dan masyarakat khususnya kaum perempuan tentang kebencanaan
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) : • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana • Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 419.031 orang - Laki-laki sebanyak 210.160 orang - Perempuan sebanyak 208.871 Orang • Data korban bencana 326 orang - Laki-laki sebanyak 165 orang - o Anak-anak sebanyak 56 orang - o Dewasa sebanyak 109 rang - Perempuan sebanyak 161 orang - o Anak-anak sebanyak 44 orang - o Dewasa sebanyak 117 orang • Jumlah penduduk di daerah rawan bencana 408.424 • Luas wilayah Kabupaten Solok 3.738 KM² • Luas wilayah rawan bencana 3.738 KM² 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Akses : • Keterbatasan pelatihan dan sertifikasi personel. Partisipasi : Memberikan pendampingan ilmiah dan kajian risiko bencana Kontrol : • Kecepatan dan akurasi laporan target Frekuensi dan tingkat partisipasi latihan Manfaat : TRC mampu merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat a. Penyebab Internal : • Kemampuan teknis personel TRC belum merata. • Masih rendahnya jumlah personel yang memiliki sertifikasi kebencanaan. • Kurangnya pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi. • Minimnya pengalaman lapangan dalam penanganan bencana

	tertentu
	b. Penyebab Eksternal : • Belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap penguatan TRC. • Perubahan regulasi kebencanaan yang cepat belum diikuti penyesuaian di daerah. • Kurangnya sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan. • Belum adanya standar kapasitas TRC yang seragam di seluruh daerah

PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Tujuan	Pengembangan kapasitas TRC
		Aktifitas	1. Peningkatan SDM (kualitas dan kuantitas) dalam wawasan kebencanaan terhadap Perempuan
		Sumber Daya (Out Put)	Dana : Rp. 28.000.000
			Panitia : BPBD
			Peserta : TRC BPBD Perempuan dan masyarakat
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer.
		Out Come	Rumusan kinerja menunjukkan peningkatan nyata pada aspek kecepatan respons, kualitas penanganan, koordinasi, profesionalisme SDM, pemanfaatan teknologi, dan kesiapsiagaan daerah, yang secara keseluruhan memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana secara berkelanjutan.. Indikator Kinerja Jumlah personil Tim Reaksi Cepat yang sebelumnya 10 orang diusahakan menjadi 15 orang



Kepala Pelaksana

Khairul, S.Sos

NIP. 197212011993031005

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program/Program Peninggulangan Bencana	Data Pembuka Wilayah • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peninggulangan Bencana	Iku Gender : Masih kurangnya informasi kebencanaan di masyarakat			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan:			Monitoring
Kepolisian Pelayanan Informasi Kerawanan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah penduduk : 419.021 orang Laki-laki 212.180 orang Perempuan 206.871 orang	Faktor Keangangan Akses : • Keterbatasan pelatihan dan sertifikasi personel • Kurangnya latihan dan simulasi berkala • Kekurangan sarana, prasarana operasional • Belum adanya integrasi penuh antarinstansi masih kurangnya peran wanita dalam evakuasi bencana Partisipasi : • Memberikan pendampingan timah dan kajian risiko bencana Kontrol : • Kecepatan dan akurasi laporan target • Frekuensi dan tingkat partisipasi latihan Manfaat : • TRC mampu merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat	Seluruh Keangangan Internal • Kemampuan teknis personel TRC belum merata • Masih rendahnya jumlah personel yang memiliki sertifikasi kebencanaan • Kurangnya pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi • Minimnya pengalaman lapangan dalam penanganan bencana tertentu	Seluruh Keangangan Eksternal • Belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap penguatan TRC • Perubahan regulasi kebencanaan yang cepat belum diikuti penyesuaian di daerah • Kurangnya sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan • Belum adanya standar kapasitas TRC yang seragam di seluruh daerah	Reformulasi Tujuan • Terejadinya TRC yang responsif dan siap siaga 24 jam • Meningkatnya kecepatan dan ketepatan respon penanganan bencana • Meningkatnya kemampuan koordinasi dan operasi lapangan • Menurunnya risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana • Meningkatnya ketahanan daerah dan masyarakat terhadap bencana	Rencana Aksi 1. Sosialisasi/pelatihan informasi tentang kebencanaan 2. Pengadaan sarana prasarana peralatan kebencanaan 3. Meningkatkan koordinasi dengan OPO terkait dan lintas sektoral 4. Peningkatan kapasitas SDM TRC 5. Memberikan sosialisasi kebencanaan, pelatihan kebencanaan kepada gender 6. Mengapresiasi gender sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana ke masyarakat	Basis Data • Jumlah personel TRC sesuai standar kebutuhan wilayah rawan bencana • Persentase personel bersertifikasi kebencanaan: minimum 50% (dalam mayoritas) • Pelatihan teknis (SAR, k3p, cecid, manajemen posko) masih kurang • Belum semua personel menguasai SOP penanganan bencana	Indikator Kinerja 1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota sebanyak 35 orang Desain Input : Rp. 25.000.000 - GBS : Rp. 85.305.800 - Output : Output pengembangan kapasitas TRC Kabupaten Kota mencakup peningkatan kompetensi SDM, penguatan kelembagaan, keterwakilan sarana prasarana, penguatan sistem pelatihan, digitalisasi informasi serta penguatan koordinasi. Seluruh output ini menjadi dasar untuk menghasilkan TRC yang lebih tanggap, terampil, berkoordinasi, dan siap operasional dalam penanganan bencana Outcome : Outcome pengembangan kapasitas TRC Kabupaten Kota menunjukkan peningkatan nyata pada aspek kesiapan respon, kualitas penanganan, koordinasi, profesionalisme SDM, pemanfaatan teknologi, dan kesiapan daerah yang secara keseluruhan mengakibatkan ketahanan daerah terhadap bencana secara berkelanjutan



MATRIK
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2027
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Data pembuka wawasan	Isu Gender : PENINGKATAN KUALITAS PERSONIL PEREMPUAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN PERDA			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Kinerja
Sub Kegiatan: Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah anggota Operasional Satpol PP (249 orang) 215 orang laki-laki dan 34 orang perempuan	a) Dari aspek partisipasi perempuan diikuti sertakan dalam operasional Poi-PP. b) Dari aspek Akses: perempuan diikuti sertakan dalam kegiatan penegakkan perda. c) Dari aspek kontrol: dalam pelaksanaan tugas personil Operasional Poi-PP yang perempuan selalu didampingi oleh PPNS dalam hal pemeriksaan tersangka / pemeriksa pelanggaran perda yang berjenis kelamin perempuan. d) Demi aspek manfaat: kehadiran perempuan dalam kegiatan / tim Operasional Penegak Perda berguna untuk memeriksa tersangka pelanggar perda khusus untuk jenis kelamin perempuan, guna menghindari pelanggaran dalam pemrosesan pelanggaran perda	Dengan dasar tupoksi dan SOP Satpol-PP khusus dalam Operasional, dimana sering melakukan razia pada malam hari dan juga sering berhadapan dengan penyakit masyarakat seperti: miras, judi, mesum dan lain-lain yang indektiknya dengan tugas laki-laki	1).Adanya permasalahan/ pelanggaran yang dilakukan perempuan dalam kegiatan hubungan masyarakat yang bertantangan dengan peraturan daerah kabupaten solok. 2). Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan	Tujuan: Peningkatan kualitas personil perempuan dalam rangka penegakkan perda dan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat harus responsif gender dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan tersebut	1. Penambahan anggota operasional perda khususnya anggota perempuan. 2. Permintaan anggota operasional perda yang proporsional antara wanita dan pria.	Tenaga operasional penegakan perda di Kabupaten Solok adalah sebanyak 249 orang. Semua anggotanya terdiri dari laki-laki 215 dan perempuan 34 orang. Usulan permasalahan yang menyangkut perempuan kurang terakomodir karena tidak seimbangnya jumlah anggota laki-laki dan perempuan	Input: Anggaran Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Indikator Output : - Usulan permintaan anggota Operasional penegakkan perda sebanyak 249 orang terdiri dari 215 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. - Anggota operasional penegakkan perda yang responsif gender dengan adanya data terpilih penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan Indikator Outcome: Terakomodirnya usulan - usulan permasalahan perempuan di Kabupaten Solok

Arosuka, 07 Juni 2026

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR



Dr. ASRI, MM

NIP. 19721113-199203-1-002

GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD
Anggaran

: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun
: 2027

NO	ASPEK	URAIAN	
1.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	
2.	Indikator Kinerja Output Kegiatan	Terakomodirnya usulan -usulan permasalahan perempuan di Kabupeten Solok.	
3.		Tujuan: Peningkatan kualitas personil perempuan dalam rangka penegakkan perda dan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat harus responsif gender dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan tersebut.	
4.	Analisa Situasi	1. Data Pembuka Wawasan - Jumlah anggota Operasional Satpol PP (249 orang) 215 orang laki-laki dan 34 orang perempuan 2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender Faktor: Faktor Kesenjangan a) Dari aspek partisipasi: perempuan diikut sertakan dalam operasional Pol-PP. b) Dari aspek Akses: perempuan diikut sertakan dalam kegiatan penegakka perda. c) Dari aspek kontrol: dalam pelaksanaan tugas personil operasional Polp-PP yang perempuan selalu didampingi PPNS dalam pelaksanaan tersangka/pemeriksa pelanggaran perda yang berjenis kelamin perempuan. d) Dari aspek manfaat: kehadiran perempuan dalam kegiatan/ tim operasional penegak perda berguna untuk memeriksa tersangka pelanggaran perda khusus untuk jenis kelamin perempuan, guna menghindari pelanggaran dalam pemrosesan pelanggaran perda. 3. Kesenjangan Internal - Dengan dasar tupoksi dan SOP Satpol-PP khusus dalam Operasional, dimana sering melakukan razia pada malam hari dan juga sering berhadapan dengan penyakit masyarakat seperti: miras, judi, mesum dan lain-lain yang indektiknya dengan tugas laki-laki. 4. Kesenjangan Eksternal - Adanya permasalahan / pelanggaran yang dilakukan perempuan dalam kegiatan hubungan masyarakat yang bertantangan dengan peraturan daerah kabupaten solok. - Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan	
5.	Rencana Aksi	Komponen I	Penambahan anggota operasional perda khususnya anggota perempuan
		Komponen II	Permintaan anggota operasional perda yang proporsional antara wanita dan pria.
6.	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp . 30.000.000,-	
7.	Dampak/hasil Output Kegiatan	- Usulan permintaan anggota Operasional penegakkan perda sebanyak 249 orang terdiri dari 215 orang laki-laki dan 34 orang perempuan menurunnya angka kejadian kebakaran di Kabupaten solok - Anggota operasional penegakkan perda yang responsif gender dengan adanya data terpilah penerima manfaat antara laki-laki dan perempuan	

Arosuka, 07 Juni 2026

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR



Dr. ASRIL, MM

NIP. 19721113 199203 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
TAHUN : 2026

PROGRAM	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KEGIATAN	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat/Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/kota
SUBKEGIATAN	2.13.05.2.01.0001 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan a. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dan Peraturan-peraturan Menteri Kependudukan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. b. No. 38-46/MPK-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Terorization dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). c. Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solik adalah 618 Posyandu. d. Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solik pada tahun 2023 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan. 2. Isu dan Tawar Respon Gender a. Faktor Kesenjangan Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari khususnya Posyandu mengenai kesetaraan gender. b. Penyebab Internal 1. Minat masyarakat khusus keputihan Posyandu adalah tagatannya untuk perempuan saja. 2. Belum sempainya informasi mengenai responsif gender kepada masyarakat. 3. Belum diteruskannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga. c. Penyebab Eksternal 1. Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten. 2. belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor) 3. Minat masyarakat tentang kegiatan posyandu yang masih pola lama
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ular Membentuk kompetensi kepengurusan yang bagus berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di kabupaten. Kecamatan maupun Nagari 2. Indikator dan Target Kinerja Tertaksananya Pembinaan terhadap kader posyandu yang ada di kabupaten solik. Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi lembaga kemasyarakatan khususnya posyandu nagari di Kabupaten Solik.
JUMLAH ANGGARAN DAN KEGIATAN	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah Rp. 300.000.000,-
RENCANA AKSI	1. Melaksanakan Sosialisasi bertatap lembaga-lembaga yang ada di Nagari 2. Mengadakan Bimbingan atau peningkatan kapasitas bagi anggota dan kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di Nagari 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi lembaga kemasyarakatan khususnya posyandu nagari di Kabupaten Solik. 4. Melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender terhadap kelembagaan masyarakat khususnya posyandu di Kabupaten Solik Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGARI**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBURA WAWASAN	PELAKSIAN						
		FAKTOR KESENGANGAN	SEBAR INTERNAL	SEBAR EKSTERNAL	REFORMASI TUJUAN	RENCANA AKSI	RASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	No. SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Akses: Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari khususnya posyandu mengenai kesetaraan gender	1. Mindset masyarakat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatannya untuk perempuan saja	1. Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten	Memberikan kompetensi kepemimpinan yang bagus berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di kabupaten, Kecamatan maupun Nagari	1. Melaksanakan Sosialisasi berkala terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari	Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada tahun 2025 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan.	Melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender pada lembaga kemasyarakatan di nagari khususnya posyandu
	Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dan Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat	Partisipasi : kader posyandu yang ada di kabupaten Solok semuanya perempuan	2. Belum sempainya informasi mengenai responsif gender kepada masyarakat	2. belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)		2. Melakukan Simulasi atau peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurus lembaga-lembaga yang ada di Nagari	Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 615 Posyandu	Input: Rp. 300.000.000,- Output: terlaksananya pembinaan terhadap kader posyandu yang ada di kabupaten Solok. Outcome: 1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan pengurus lokal pada lembaga kemasyarakatan dan khususnya posyandu kabupaten solok
		Kontrol : Belum adanya informasi ke masyarakat mengenai kegiatan posyandu bukan khusus untuk perempuan saja	3. Belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga	3. Mindset masyarakat tentang kegiatan posyandu yang masih pola lama		3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi lembaga kemasyarakatan khususnya posyandu nagari di Kabupaten Solok		2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi lembaga kemasyarakatan khususnya posyandu nagari di Kabupaten Solok
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 615 Posyandu	Mertaat : Belum harmonisasinya pelaksanaan dalam kegiatan posyandu	4. proses pemerintahan yang belum memiliki konsep gender secara maksimal					Input: Rp. 300.000.000,- Output: terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga posyandu di kabupaten solok
	Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada tahun 2022 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan.		5. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor					Outcome: terhilangnya segala permasalahan yang ada di lembaga kemasyarakatan khususnya posyandu sehingga dapat dicari pemecatan masalahnya

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBUKUAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUKUAN RENCANA KEDEPAN		PEGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESERDANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Tujuan: Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Penguasaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31479 Fax. (0755) 31479

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN

2027

PROGRAM	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
KEGIATAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
KODE SUB KEGIATAN	8.01.02.2.01.0004	
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data Umum : Jumlah Calon Paskibra Kabupaten Solok Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah Partisipasi : Jumlah Laki-Laki dan Perempuan yang akan mengikuti calon Paskibra Tahun 2027 Kontrol : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti calon Paskibra Manfaat : Seluruh lapisan pelajar dapat merasakan kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan yaitu : • Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah • Kontrol Kewenangan : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra • Partisipasi : Banyaknya laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra • Manfaat : Seimbang nya laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra b. Penyebab Internal • Masih terbatasnya kapasitas SDM c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender • Masih terbatasnya pemahaman pelajar tentang Paskibra	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Melaksanakan pemilihan calon Paskibra Tahun 2027 tidak membedakan laki-laki dan perempuan

		Tujuan	Meningkatnya peran serta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti penerimaan paskibra
		Aktivitas	Penerimaan Calon Paskibra Tahun 2027 : 1. Menentukan dan mengundang peserta calon paskibra yang terdiri dari pelajar SLTA 2. Menyelenggarakan penerimaan calon Paskibra 3. Membuat Laporan Input : 1) Panduan tentang paskibra 2) Calon paskibra 3) Pelatih dan Panitia Output : Terlaksananya Penerimaan calon paskibra di Kabupaten Solok
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran Rp. 936.000.000,- SDM : Peserta, Pelatih dan panitia. Peralatan dan mesin : laptop, printer, pengeras suara dll yang dirasa perlu		
OUTCOMES	- Rumusan Kinerja Meningkatnya keinginan Pelajar dalam penerimaan Paskibra tahun 2027 - Indikator Kinerja Jumlah laki-laki dan perempuan dalam mengikuti Paskibra 2027		


 Arsip di Juni 2026
 KEPALA
 DONLY WANCE LUBIS, S.STP.MM
 NIP. 19831102 200212 1 001

MATERIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		ISU GENDER			Kebijakan dan Rencana Kodepan	Pengukuran Hasil
	Faktor Kesenjangan:	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Tujuan Reformulasi	RENCANA AKSI	Indikator Data
Program Program Pengembangan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebagai TEKNIK DAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN BIDANG IDOL OOI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pada tahun 2026 dilaksanakan kegiatan Pendidikan Bela Negara yang akan di laksanakan oleh generasi muda utamanya siswa dan siswa SMA dari seluruh SDA dan lain se kecamatan di Kabupaten Solok, sebanyak 257 orang pendula yang akan di seleksi secara acak dan BPJP dan 150 jiwa lagi dari 107 perwakilan bangsa dibatasi banyak penduduk. Dan yang akan diambil untuk pasukan pembekalan sebanyak 50 orang dan 30 orang lainnya dan 30 orang perungguan.	Urutannya anggota pasukan kabupaten tidak ada kesenjangan gender karena pendidikan tidak dibatasi tetapi akan di seleksi secara transparan dan sesuai kemampuan siswa masing masing	SDA dalam penyelenggaraan seleksi dan latihan pasukan	1. Terwujudnya pembinaan masyarakat kalawa bakti dan penguatan eringnya kemampuan dalam penyelenggaraan ideologi kebangsaan	1. Mewujudkan kegiatan pengulan ideologi pancasila yang responsive ginter terwujudnya siswa nasional Indonesia 1. Penemuan data negara melalui data dan pelatihan calon pasukanya 2. Menbuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara Yud: 1. Pengertian Nama nama Siswa siswa sebagai bagian dari persahabatan dengan seluruh masyarakat 2. Terwujudnya budaya pemerintahan secara profesional secara bertahap 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	1. Mewujudkan peningkatan literasi dan pengetahuan tentang ideologi Pancasila 2. Terwujudnya budaya pemerintahan secara profesional secara bertahap 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Solok

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Subkegiatan : Rehabilitasi Berat/ Sedang Perpustakaan Sekolah Tujuan : Tersedianya gedung pustaka sekolah layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan	- Dasar regulasi sub kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah, yaitu: Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa terdapat 6 standard nasional perpustakaan, yaitu: standard koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, an standard pengelolaan. Selain itu, dalam sekolah diminta untuk: memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua	- Kondisi Pustaka Sekolah yang sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka Akses - Ketidaklayakan kondisi pustaka dan kantin menyulitkan peserta didik khususnya yang perempuan mendapatkan ruang dan waktu yang nyaman saat menggunakan pustaka Partisipasi - Jumlah siswa lelaki lebih banyak	- Kondisi bangunan pustaka sekolah lain rata-rata belum representatif dan memerlukan kesegeraan penanganan yang sama - Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk memperbaiki bangunan pustaka sekolah lain	- Masih kurangnya lama kunjungan siswa ke pustaka - Koleksi perpustakaan masih kurang lengkap - Lahan ada namun terbatas	Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan yang berbasis responsif gender	- Menyediakan buku koleksi perpustakaan yang lebih lengkap - Menyediakan fasilitas pendukung kenyamanan dalam perpustakaan - Memfokuskan anggaran untuk perbaikan bangunan pustaka agar sesuai standar nasional	Bangunan Pustaka sekolah yang rusak berat	Output : Rumusan Kinerja : - Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Indikator Kinerja : - Tersedianya bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Outcome : Rumusan Kinerja: - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka - Membudayakan perilaku suka membaca

Indikator Kinerja : Tersedianya bangunan Pustaka yang permanen, standar, nyaman, representatif, dan layak pakai. Tercapainya Indikator Kinerja diharapkan berdampak pada : 1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan 2. Meningkatnya kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan	peserta didik dan pendidik; mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. - Dasar penganggaran kegiatan, yaitu Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan merata. - Kondisi sekarang Pustaka sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka. Data Umum - Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 371 SD	dibanding siswa perempuan Kontrol - Representatif perempuan sebagai pengambil keputusan lebih besar karena berperan sebagai kepala sekolah Proporsi Guru yang didominasi oleh perempuan Manfaat - Siswa perempuan dan lelaki tidak mendapatkan manfaat yang maksimal saat menggunakan Pustaka					di kalangan peserta didik Indikator Kinerja : - Tingkat kunjungan peserta didik ke pustaka setiap harinya - Budaya perilaku suka membaca dan lama kunjungan peserta didik ke pustaka Anggaran : - Anggaran Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp. 100.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--

	- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 42.671 orang - Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.800 orang Akses - Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 324 unit. - Kondisi gedung perpustakaan SD yang butuh rehabilitasi sebanyak 1 unit Partisipasi - Jumlah Peserta SD laki-laki 21.351 orang dan perempuan 21.320 orang Kontrol - Guru 828 laki-laki dan Perempuan SD 2.972 orang Manfaat - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/ kemasyarakatan							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, 20 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok



ELAFKI, S.Pd., MM
Pembina Tk I/ IV.B
NIP. 19691112 200012 1002

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	Program Kegiatan Subkegiatan	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Rehabilitasi Berat/ Sedang Perpustakaan Sekolah
2.	Output Subkegiatan	UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Solok Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan.
3.	Analisis Situasi	1. Kondisi sekarang perpustakaan sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka. 2. Kondisi Pustaka Sekolah yang belum ada di beberapa satuan pendidikan SD, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka. Data Umum - Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 371 Sekolah - Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 42.671 orang - Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.800 orang Akses - Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 324 unit. - Kondisi perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 1 unit. Partisipasi - Jumlah Peserta SD laki-laki 21.351 orang dan perempuan 21.320 orang Kontrol - Guru SD laki-laki 828 orang dan Perempuan 2.972 orang

		Manfaat - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/kemasyarakatan	
4	Rencana Aksi	Komponen input 1	Menyediakan fasilitas pustaka dan pendukung kenyamanan dalam perpustakaan Output: Persentase Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Anggaran: Rp. 100.000.000,-
5.	Alokasi Anggaran Output Subkegiatan	- Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Berat/ Sedang Perpustakaan SD sebesar Rp. 100.000.000,-	
6.	Dampak/ Hasil Output Subkegiatan	1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka 2. Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik 3. Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik	

Arosuka, 20 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok


ELAEK, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I/ IV.B
NIP. 19691112 200012 1002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS PPKB&P3A KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN : Tahun Anggaran 2027

Program	Perlindungan Perempuan	
Kode Program	2.08.03	
Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sub.Kegiatan	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Anggaran Sub.Kegiatan	Rp 378.300.000	
Hasil /Output	Persentase Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Analisis situasi	1	Landasan Hukum dan Kelembagaan - UPTD PPA: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi garda terdepan di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan layanan dasar bagi korban kekerasan - UPTD PPA: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi garda terdepan di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan layanan dasar bagi korban kekerasan - Kapasitas SDM: Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi konselor, psikolog, serta tenaga pendamping di daerah, yang seringkali menyebabkan penanganan kasus berjalan lama - Keterbatasan Anggaran & Sarana: Fasilitas seperti <i>shelter</i> (rumah aman) dan kendaraan operasional penjangkauan korban masih belum memadai di banyak kabupaten/kota. - Sistem Rujukan Terpadu: Memastikan alur penanganan mulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga pemulihan berjalan mulus tanpa membuat korban harus mengulang cerita (trauma berulang) kepada banyak pihak

	2.	Isu dan faktor kesenjangan - Faktor Regulasi Belum ada Perbup SOP Rujukan Terpadu + SK Bupati Tim Koordinasi - Faktor Kelembagaan Forum Koordinasi PPA Kab Solok belum rutin . - SDM Sdm KONSELOR/ppa updt PPA Solok minim , overload, Belum semua tersertifikasi kemenPPPA
Rencana Aksi		Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Kuatkan dasar hukum & peran - Buat kan /update perbub SOP rujukan terpadu - Aktifkan SK tim rujukan terpadu - Tetapkan indikator bersama 2. Satukan data & Mekanisme - Integrasi ke SIMFONI PPA - Jalankan Case Conference Rutin - Buat jalur komunikasi cepat 3. Samakan kapasitas Petugas - Pelatihan trauma informed care bersama - Sosialisasi SOP ke Desa /kecamatan - Pendampingan lapangan 4. Jangkuan masyarakat & ukur hasil - Kanpanye layanan - Money triwulan - Evaluasi & perbaikan SOP
Capaian Program		Capaian ini di bagi 3 , output, outcome, dampak 1. Capaian Output - Regulasi & mekanisme - Kapasitas SDM - Sistem Data 2. Capaian Outcome - Kecepatan Respon - Kelengkapan Layanan - Kepuasan korban - Cakupan Jangkuan

	3. Capaian dampak - Indikator SPM terpenuhi - Efisiensi Anggaran - Kepercayaan publik
--	--

Koto Baru, 2026

Kepala Dinas PPKBP3A



dr.Marven Marwazi.MARS

NIP. 19671017200212001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DINAS PPKB&P3A KABUPATEN SOLOK
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Perlindungan Perempuan								
Sub-Kegiatan:Penguatan kerja sama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota								
Tujuan								
membangun keterpaduan sistem, mempercepat respon penanganan, serta menjamin pemulihan korban perempuan secara tuntas melalui sinergi lintas sektor di tingkat daerah	Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) di tingkat kabupaten meningkat dalam 2 tahun terakhir (Misal: 150 kasus perempuan dewasa).	Akses: Perempuan korban kekerasan di area pelosok/desa terpencil kesulitan mengakses lokasi pusat pelayanan pengaduan terpadu (UPTD PPA) karena kendala jarak dan biaya.	Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan dan alur rujukan antar-lembaga penyedia layanan di daerah belum sepenuhnya adaptif terhadap ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).	Masih kuatnya budaya patriarki serta adanya stigma sosial/ag yang membuat korban dan keluarga memilih menyembunyikan atau menyelesaikan kasus kekerasan secara adat damai yang merugikan perempuan	meningkatkan efektivitas, jangkauan, dan kedekatan layanan perlindungan serta pemulihan yang responsif gender bagi perempuan korban kekerasan melalui optimalisasi rujukan terpadu dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota	Melakukan pembaruan draf dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan korban lintas sektor bersama Polres, Kejaksaan, RSUD, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).	Jumlah draf kerja sama lintas sektor aktif saat ini.	Indikator Output: Jumlah dokumen kerja sama formal (PKS) aktif yang disepakati bersama instansi jejaring rujukan tingkat kabupaten/kota.

	Data rujukan lintas instansi penegak hukum dan layanan kesehatan masih tercatat secara manual dan belum terintegrasi secara <i>real-time</i> .	Partisipasi: Rendahnya keikutsertaan kelompok organisasi wanita/tokoh masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan dini indikasi kekerasan seksual/fisik di wilayah lingkungan warga.	Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) konselor, psikolog klinis, dan mediator terlatih di tingkat kabupaten/kota.			Menyelenggarakan lokakarya standarisasi SOP penanganan kasus berbasis perlindungan hak korban perempuan sesuai mandat UU TPKS.	Rata-rata waktu penyelesaian koordinasi layanan penanganan kasus dari laporan masuk hingga tahap pemulihan.	Indikator Outcome: Persentase kasus perempuan korban kekerasan yang tertangani secara cepat, komprehensif, dan terpadu (aspek hukum, medis, serta psikologis).
	Hanya 30% korban perempuan di wilayah pedesaan yang melanjutkan pendampingan kasusnya hingga tahap pemulihan psikologis pasca-trauma.	Kontrol: Korban perempuan seringkali tidak memiliki kendali atau keputusan penuh untuk melanjutkan proses hukum akibat adanya intimidasi atau tekanan ekonomi keluarga.				Mengadakan pelatihan/workshop pemanfaatan aplikasi pelaporan satu data terintegrasi nasional (Simfoni-PPA) untuk operator layanan instansi mitra.		
		Manfaat: Layanan pemulihan psikososial pasca-putusan pengadilan belum dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh perempuan korban kekerasan.				Mem bentuk dan mengedukasi jejaring perlindungan berbasis masyarakat (seperti Satgas PPA/PATBM) di tingkat desa guna mempercepat respon aduan.		

Koto Baru, Juni 2026

Kepala DPPKBP3A



dr. MARYATI MARWAZI, MARS

Nip. 19671017 200212 2 001